



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENGARUH KETERBUKAAN PERDAGANGAN  
SERTA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERHADAP  
KINERJA INVESTASI DAERAH**

**TESIS**

**IMAM SUPARDI  
NPM 0606140913**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM PASCASARJANA  
DEPOK  
DESEMBER 2008**

Analisis pengaruh... Imam Supardi, FE UI, 2008.

**UNIVERSITAS INDONESIA**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENGARUH KETERBUKAAN PERDAGANGAN  
SERTA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERHADAP  
KINERJA INVESTASI DAERAH**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains Ekonomi  
Pada Program Studi Ilmu Ekonomi  
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

**IMAM SUPARDI  
NPM 0606140913**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
KEKHUSUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
DEPOK  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : IMAM SUPARDI  
NPM : 0606140913  
Tanda Tangan :  .....  
Tanggal : .....

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : IMAM SUPARDI  
NPM : 606140913  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Ekonomi  
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Serta Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Kinerja Investasi Daerah.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing Tesis : Dr. Djoni Hartono

(  


Ketua Penguji Tesis : Prof. Dr. Nachrowi D. Nachrowi

(

Penguji Tesis : Dr. Nuzul Achjar

(

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Desember 2008

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena hanya karena limpahan berkah, rahmat serta pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan studi dan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Ekonomi pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas dan Bupati Kudus yang telah memberikan beasiswa tugas belajar kepada penulis di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Dr. Djoni Hartono, selaku pembimbing yang di tengah kesibukannya telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberi saran yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini;
3. Dr. Arindra A. Zainal selaku Ketua Program dan Prof. Dr. Nachrowi Djalal Nachrowi selaku Ketua Penguji serta Dr. Nuzul Achjar selaku Anggota Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini;
4. Pengelola, Dosen pengajar, dan Staf PPIE : Mbak Mirna, Mbak Ria, Mbak Yati, Mbak Mita, Mas Wasdi dan Mas Adi yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia;
5. Ibunda tercinta beserta keluarga yang dengan penuh kasih telah memberi dukungan moril maupun materiil dan terutama doá bagi penulis selama mengikuti pendidikan ini;
6. Bapak Puji Eling Susilohadi, S.Sos, selaku Camat Kaliwungu, Bapak Adi Sadono selaku Sekretaris Kecamatan Kaliwungu serta Bapak Arif

Suwanto S.Sos selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kaliwungu yang telah membri ijin serta semangat hingga suksesnya pendidikan ini;

7. Rekan-rekan seperjuangan Kelompok Bappenas PPIE-UI terutama “Pak Penta dan Bang Isnuroso yang dalam menempuh pendidikan hingga penyelesaian tesis ini telah banyak membantu dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Yang terakhir adalah Yai Muhaidi serta berbagai pihak yang telah memberikan saran, bantuan doa serta restu hingga terselesaikannya pendidikan ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selesainya studi ini. Tesis ini bukan tujuan akhir melainkan merupakan salah satu tujuan antara yang harus penulis lalui untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, kebaikan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang berkesempatan membaca tulisan ini sangat diharapkan.

Depok, 23 Desember 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUPARDI  
NPM : 0606140913  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PENGARUH KETERBUKAAN PERDAGANGAN SERTA  
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KINERJA  
INVESTASI DAERAH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Agustus 2008

Yang menyatakan,



**IMAM SUPARDI**

## ABSTRAK

Nama : IMAM SUPARDI  
Program studi : Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi  
Judul : Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Serta Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Kinerja Investasi Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi daerah pada tiap propinsi berupa peningkatan kinerja investasi daerah. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan tingkat keterbukaan perdagangan serta peningkatan kualitas maupun kapasitas infrastruktur. Oleh karena itu penelitian ini dirancang untuk : (1) menganalisa besarnya pengaruh faktor penentu kinerja investasi daerah; (2) menentukan jenis-jenis faktor penentu kinerja investasi daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan investasi daerah; (3) memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka menangkap peluang masuknya investasi, mengoptimalkan faktor-faktor penentu daya tarik yang dimiliki serta melakukan evaluasi kebijakan terhadap peningkatan kinerja investasi secara keseluruhan. Metode estimasi yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Metode dan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan data 26 Propinsi di seluruh Indonesia (diasumsikan bahwa Propinsi Timor-Timur telah memisahkan diri dari Indonesia (NKRI) dan beberapa propinsi belum melakukan pemekaran untuk memudahkan pengolahan data) periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat statistik (BPS) Pusat. Hasil analisis menunjukkan model yang paling sesuai untuk estimasi ini adalah *Fixed Effect Models* dengan struktur varian kovarian dari residual heterokedastik. Nilai koefisien regresi merupakan elastisitas masing-masing input yaitu keterbukaan perdagangan (0.060), panjang jalan (0.245), listrik (0.052), telepon (0.126) serta air bersih (0.014). Total dari elastisitas merupakan skala ekonomi. Tingkat keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur (Panjang jalan, listrik, telepon serta air bersih) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja investasi daerah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap kinerja investasi daerah, namun secara parsial mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Peningkatan kinerja investasi daerah dapat dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif antara lain : (1) penyederhanaan prosedur perijinan; (2) adanya kepastian hukum tercermin dari tidak adanya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor; (3) pemberian insentif investasi; (4) peningkatan kualitas serta kapasitas infrastruktur; (5) iklim ketenagakerjaan yang kondusif; (6) jaminan keamanan melakukan usaha; serta (7) kondisi ekonomi makro : stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar serta stabilitas sosial politik.

Kata kunci : Keterbukaan Perdagangan, Infrastruktur dan Kinerja Investasi Daerah.

## ABSTRACT

Name : IMAM SUPARDI  
Study Program : Post Graduate of Economy  
Title : Trade Exposure Influence Analysis and Infrastructure Availability of Regional Investment Performance

A Regional investment performance improvement has become an effort to increasing regional investment on each province. It Shall be conducted through trade exposure level enhancement and infrastructure capacity or quality improvement. Therefore this research is designed to : (1) analyzing determinant factor influence of regional investment performance; (2) defining varies determinant factor of regional investment performance that provide major contribution to regional investment plan;(3) providing any input to regional government regarding to drag any investment entry, by optimizing determinant factors of attraction and conducting a policy evaluation towards investment performance improvement thoroughly. Data panel regression analysis are used with estimation method. Analysis and Method on this research is based on prior observation results.

Research is applying 26 province data throughout Indonesia territory ( it is assumed that East Timor province has separated themselves from Indonesia (NKRI) and several province that has not performing an expansion to enable data process) year period 2001-2006 which derives from Center Statistic Bureau (BPS). The result of analysis demonstrate that most congruous model for estimation is Fixed Effect Models with covariant variant structure of heterochedastic residual. Regression co efficient value of an elasticity on each input is trade exposure (0.060), length of road (0,245), electricity (0.052), telephone (0.126) and mineral water (0.014). Total elasticity is economical scale. Trade exposure level and infrastructure availability (length of road, electricity, telephone and mineral water) has significant influenced to regional investment performance simultaneously.

Research conclude that trade exposure level and infrastructure availability has influenced to regional investment performance simultaneously, nevertheless it has differ influence partially. Regional investment performance improvement shall be conducted by a conducive investment climate plan that is : (1) legal procedure simplicity; (2) law certainty where it is reflected that there are no overlapping in policy among region and center and inter sector; (3) investment incentives distribution; (4) infrastructure capacity and quality improvement; (5) a conducive workforce climate; (6) security assurance to run business; and (7) macro economy situation : macro economy stability, economy exposure, market competition and social politic stability.

Keyword : Trade Exposure, Regional Investment Performance and Infrastructure.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata pengantar .....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademik .....	vii
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	14
1.4. Metodologi dan Hipotesis Penelitian .....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
<b>2. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>18</b>
2.1. Teori Investasi .....	18
2.2. Iklim Investasi .....	19
2.3. Teori Perdagangan Internasional .....	22
2.3.1. Teori Absolut Advantage Adam Smith .....	22
2.3.2. Teori Comparative Advantage David Ricardo .....	23
2.3.3. Teori Faktor Endowment Heckscher-Ohlin .....	24
2.3.4. The Product Cycle Theory .....	25
2.3.5. Manfaat Perdagangan Internasional .....	26
2.3.6. Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi .....	27
2.4. Infrastruktur .....	30
2.5. Studi Empiris Terdahulu .....	32
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Kerangka Pikir Penelitian .....	37
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	38
3.3. Spesifikasi Model dan Variabel yang digunakan .....	40
3.4. Analisa dengan Regresi Data Panel .....	42
3.5. Estimasi Regresi Data Panel.....	45
3.5.1. Model Common Effect.....	45
3.5.2. Model Individual Effect .....	45
3.5.2.1. Model Fixed Effects .....	46
3.5.2.2. Model Random Effects .....	46
3.6. Uji Spesifikasi Model.....	47
3.6.1. Pemilihan Model antara Common Effect dengan Individual	

Effect .....	48
3.6.2. Pemilihan Model antara Fixed Effect dan Random Effect....	48
3.6.3. Pemilihan Model Estimator dengan melihat Struktur Varian dan Kovarian dari Residual.....	49
3.7. Pengujian Signifikansi .....	49
3.7.1. Uji Kesesuaian ( $R^2$ ) .....	49
3.7.2. Uji Secara Serempak (Uji F) .....	50
3.7.3. Uji t (Parsial) .....	51
<b>4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
4.1. Uji Spesifikasi Model .....	52
4.2. Uji Signifikansi dan Arah Pengaruh Variabel-Variabel Bebas terhadap Kinerja Investasi Daerah .....	54
4.3. Pembahasan Hasil Estimasi .....	56
4.3.1. Analisis Koefisien Variabel-Variabel Bebas Hasil Estimasi .....	56
4.3.1.1. Hubungan Antara Tingkat Keterbukaan Perdagangan dengan Kinerja Investasi Daerah .....	56
4.3.1.2. Hubungan Antara Ketersediaan Infrastruktur dengan Kinerja Investasi Daerah .....	57
4.4. Analisis Efek Individu Tiap Propinsi .....	60
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi Investasi di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2005 (dalam %) .....	4
Tabel 1.2	Kontribusi Investasi terhadap PDRB menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2005 (dalam %) .....	5
Tabel 1.3	Perbandingan Kemudahan Memulai Usaha Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara, China, dan India .....	9
Tabel 2.1	Hasil simulasi Modal Makroekonometri persentase peningkatan PDB akibat kenaikan stok infrastruktur sebesar 10 persen.	31
Tabel 2.2	Peringkat Indonesia Untuk Kelembagaan Publik dalam ASEAN berdasarkan <i>The Global Competitiveness Report</i> 2004-2005 (104 negara) 2005-2006 (117 negara) .....	32
Tabel 4.1	Hasil Regresi .....	54
Tabel 4.2	Efek Individu tiap Propinsi.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perdagangan Internasional pada kondisi autarky .....	26
Gambar 3.1	Alur Pikir Penelitian .....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Estimasi dengan Model *Common Effect*
- Lampiran 2. Hasil Estimasi dengan Model *Random Effects*
- Lampiran 3. Hasil Estimasi dengan Model *Fixed Effects*
- Lampiran 4. Hasil Uji F (Individual Effect atau Common Effect)
- Lampiran 5. Hasil Uji LM (Struktur var-cov residual homokedastik atau heterokedastik)
- Lampiran 6. Hasil Estimasi *Fixed Effects* dengan *Cross Section Weights*
- Lampiran 7. Perkembangan Realisasi Investasi (Izin Usaha Tetap) PMDN dan PMA Menurut Lokasi, 2001-September 2006

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, bila diikuti dengan peningkatan daya saing, investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan *output* atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Investasi yang rendah akan memperkecil peluang alih teknologi dan teknokrasi yang dibawa oleh investasi. Permasalahan investasi di Indonesia secara ringkas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009. Secara lebih spesifik, rinciannya adalah sebagai berikut: (i) prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang panjang, dimana prosedur perijinan untuk memulai usaha di Indonesia termasuk relatif lebih lama, mahal dan cukup rumit dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan Asia-Pasifik; (ii) masih rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya tumpang-tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta kebijakan antar sektor; (iii) belum menariknya insentif bagi kegiatan investasi, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk tertinggal di dalam menyusun insentif investasi; (iv) rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur yang sebagian besar terus memburuk sejak krisis; (v) iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif; dan (vi) kurangnya jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan investasi/usaha.

Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Iklim investasi meliputi kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi yang sehat tersebut mencakup: (i) kondisi ekonomi makro: termasuk stabilitas

ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik; (ii) pengelolaan pemerintahan dan berbagai aturan main seperti perpajakan dan kebijakan fiskal, kompetensi lembaga fasilitasi kegiatan usaha, fleksibilitas pasar tenaga kerja serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; (iii) infrastruktur yang mencakup antara lain sarana ekonomi seperti lembaga keuangan sampai dengan sarana fisik seperti jaringan transportasi, serta kapasitas telekomunikasi, listrik, dan air.

Menurut Tambunan (2006) ada sejumlah factor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sector pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu perburuhan) regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi dan hak milik dari tanah sampai kontrak.

Dalam pandangan Tambunan (2006) ada tiga faktor utama dalam iklim investasi adalah : pertama kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar dan stabilitas sosial politik, kedua pemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil, ketiga infrastruktur mencakup antara lain transportasi telekomunikasi, listrik dan air. Adapun faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat antara lain adalah proses perizinan yang berbelit-belit dan lambat, pungutan formal dan tidak formal, ketidakstabilan politik, hambatan institusional.

Dalam konteks pembangunan nasional dewasa ini, kepentingan peningkatan investasi sesungguhnya memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya sekedar penciptaan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Berkaitan dengan isu dan permasalahan yang kita hadapi, misi peningkatan investasi pada dasarnya mencakup tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu: (i) penciptaan

pertumbuhan ekonomi dan kesempatan lapangan kerja; (ii) berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan pada gilirannya; (iii) terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Berkenaan dengan tujuan tersebut, upaya peningkatan investasi sangat terkait erat dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dalam kaitan inilah, diperlukan kepemimpinan yang visioner untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan upaya memobilisasi para pelaku, organisasi dan sumberdaya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah lembaga pelayanan urusan investasi di tingkat nasional yang fungsi utamanya adalah mengimplementasikan misi pemerintah dalam peningkatan penanaman modal. Dalam menjalankan fungsi tersebut BKPM memiliki kewenangan: (a) menyiapkan perencanaan investasi di tingkat nasional; (b) merumuskan kebijakan investasi; (c) mengembangkan sistem informasi investasi; (d) memberikan persetujuan dan mengendalikan implementasi investasi yang berisiko tinggi.

Upaya pelayanan investasi terus dilakukan oleh BKPM, dengan sasaran akhir terwujudnya "*one stop service*" kepada para investor, baik asing maupun domestik. Untuk mengarah ke sana BKPM mengembangkan beberapa jenis pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi Investasi, mencakup informasi tentang : potensi dan peluang investasi, mitra usaha potensial baik asing maupun domestik bagi investor yang berniat melakukan *joint venture* di Indonesia, kebijakan pemerintah, peraturan dan perundang-undangan terkait kegiatan investasi, statistik investasi, dan informasi terkini terkait investasi di Indonesia.
- b. Panduan dan konsultasi bagi para investor dalam mempersiapkan aplikasi investasi baru, pengembangan investasi, dan perubahan proyek investasi.
- c. Monitoring dan evaluasi atas kemajuan kegiatan investasi, termasuk menyediakan panduan dan konsultasi bagi investor dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek investasi.

Investasi swasta dirasakan semakin penting mengingat kapasitas fiskal pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) yang terbatas sehingga sulit untuk selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan. Dampak penganda

yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatnya pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antardaerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi.

Perkembangan investasi di Indonesia saat ini belum menyebar secara merata antar daerah. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai investasi tertinggi atau setara dengan 27,9 persen dari total investasi di Indonesia. Lebih dari 60 persen investasi terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Provinsi Maluku Utara dan Maluku adalah dua provinsi dengan nilai investasi terendah (lihat Tabel 1.1.).

Tabel 1.1  
Distribusi Investasi di Indonesia menurut Provinsi  
Tahun 2005 (%)

No	Provinsi	Proporsi Investasi	No	Provinsi	Proporsi Investasi
1	DKI Jakarta	27.91%	18	Papua	1.05%
2	Jawa Timur	12.74%	19	Nusa Tenggara Barat	1.01%
3	Jawa Barat	11.21%	20	Bali	0.78%
4	Jawa Tengah	6.51%	21	Sulawesi Utara	0.63%
5	Riau	5.31%	22	Kalimantan Selatan	0.60%
6	Sumatera Utara	4.01%	23	Nusa Tenggara Timur	0.57%
7	Kepulauan Riau	3.78%	24	Sulawesi Tengah	0.57%
8	Kalimantan Timur	3.78%	25	Sulawesi Tenggara	0.53%
9	Banten	3.68%	26	Jambi	0.51%
10	Sumatera Selatan	2.88%	27	Irian Jaya Barat	0.44%
11	Sulawesi Selatan	1.93%	28	Kep. Bangka Belitung	0.38%
12	Kalimantan Barat	1.91%	29	Gorontalo	0.19%
13	Sumatera Barat	1.48%	30	Bengkulu	0.15%
14	DI. Yogyakarta	1.36%	31	Sulawesi Barat	0.08%
15	Lampung	1.34%	32	Maluku	0.03%
16	Kalimantan Tengah	1.33%	33	Maluku Utara	0.02%
17	N. Aceh Darussalam	1.29%			

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik

\*) Investasi menggunakan data Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000.

Pola persebaran investasi tersebut selain disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur juga disebabkan oleh kemudahan dalam mendapatkan layanan perijinan, dukungan sumber daya, dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi. Perbedaan nilai investasi antardaerah ini juga memperlihatkan perbedaan sumbangan investasi dalam menggerakkan perekonomian daerah. Data tahun 2005 tentang rasio dari pembentukan modal

tetap domestik bruto terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kontribusi investasi tertinggi dengan investasi sebesar 45,5 persen dari total aktivitas perekonomian daerah tersebut. Di sisi lain, terdapat empat provinsi yang selain nilai investasinya rendah juga kontribusi investasi dalam perekonomian daerah relatif rendah, yakni kurang dari 10 persen. Provinsi tersebut antara lain adalah Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku dan Maluku Utara (lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2.  
Kontribusi Investasi terhadap PDRB menurut Provinsi di Indonesia  
Tahun 2005 (dalam %)

No	Provinsi	Proporsi Investasi terhadap PDRB	No	Provinsi	Proporsi Investasi terhadap PDRB
1	Kepulauan Riau	45.49%	18	Sulawesi Tengah	17.68%
2	Kalimantan Tengah	34.91%	19	Papua	17.19%
3	DKI Jakarta	34.53%	20	Kep. Bangka Belitung	16.83%
4	Gorontalo	33.91%	21	Lampung	16.74%
5	Irian Jaya Barat	30.07%	22	Jawa Barat	16.67%
6	Kalimantan Barat	29.75%	23	Sumatera Utara	16.66%
7	DI. Yogyakarta	29.35%	24	Jawa Tengah	16.63%
8	Riau	24.48%	25	Jambi	14.86%
9	Nusa Tenggara Barat	24.34%	26	Kalimantan Timur	14.75%
10	Sulawesi Tenggara	24.24%	27	N. Aceh Darussalam	13.49%
11	Banten	23.13%	28	Bali	13.44%
12	Nusa Tenggara Timur	21.56%	29	Kalimantan Selatan	10.13%
13	Sumatera Selatan	21.21%	30	Sulawesi Barat	9.09%
14	Sulawesi Selatan	19.35%	31	Bengkulu	8.51%
15	Sumatera Barat	18.48%	32	Maluku	3.48%
16	Jawa Timur	18.15%	33	Maluku Utara	3.32%
17	Sulawesi Utara	18.12%			

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2006  
Catatan: Dihitung pada data alas dasar harga konstan Tahun 2000

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki proporsi investasi lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Hanya 11 (sebelas) provinsi yang memiliki kontribusi investasi lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kenyataan ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam bentuk sinkronisasi kebijakan. Menurut jenis investasi, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sebagian besar sangat dominan berada di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam periode tahun 2001 sampai September 2006, realisasi investasi di wilayah ini sekitar 98 persen untuk PMDN dan 99

persen untuk PMA. Konsentrasi investasi di KBI berada di Pulau Jawa, yang persinya mencapai 50 persen untuk PMDN dan sekitar 70-80 persen untuk PMA secara nasional. Pulau Sumatera adalah wilayah kedua yang menjadi lokasi berinvestasi, namun dengan selisih yang cukup besar bila dibandingkan dengan Pulau Jawa, yaitu sekitar 40 persen untuk PMDN dan sekitar 13 persen untuk PMA (lihat Lampiran 7). Investasi di Pulau Jawa khususnya dan KBI umumnya telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil khususnya pada periode sebelum krisis 1997/1998.

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa belum semua daerah dapat melaksanakan otonomi dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut terlihat dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama terkait dengan permasalahan regulasi (peraturan daerah), serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya keuangan melalui pengeluaran atau belanja daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, daerah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah baru, khususnya terkait dengan pungutan pajak dan retribusi daerah yang sering tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya, dan menambah beban bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan. Sementara itu, sumber daya keuangan yang dimiliki daerah juga belum dialokasikan dan didistribusikan secara efisien dan efektif, baik dalam penyediaan barang dan pelayanan publik maupun dalam mendorong kinerja sektor riil di daerah. Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah bermasalah yang muncul pada awal pelaksanaan desentralisasi mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi di daerah, rendahnya investasi baru yang masuk ke daerah dan lemahnya daya saing usaha. Perda yang bermasalah tersebut mungkin disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, Perda-perda tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari undang-undang mengenai pajak dan retribusi daerah, tetapi Peraturan Daerah tersebut memberikan penafsiran yang salah terhadap Undang-undang No. 34 Tahun 2004. Akibat penafsiran yang salah tersebut, suatu aktivitas yang seharusnya tidak terkena pajak atau retribusi daerah menurut pengertian Undang-undang pajak dan retribusi daerah ternyata dikenakan pajak atau retribusi daerah. *Kedua*, Peraturan Daerah tersebut memang dibuat untuk menciptakan pajak atau retribusi baru yang tidak ada dalam Undang-undang

No. 34 Tahun 2004 seperti sumbangan wajib, pajak ekspor (retribusi terhadap hasil bumi daerah yang dijual ke luar daerah), pajak komoditas (pajak yang dikenakan terhadap komoditas daerah tertentu dan bertentangan dengan Undang-undang pajak nasional), serta retribusi tenaga kerja (pungutan terhadap perusahaan yang memakai tenaga kerja bukan lokal dan dapat mengganggu pergerakan orang antardaerah). Hal ini akan berdampak terhadap memburuknya iklim usaha dan menghambat upaya pengembangan ekonomi. Peraturan Daerah bermasalah juga memicu reaksi publik yang menganggap bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ternyata hanya menciptakan hambatan birokratis dan beban pungutan bagi perusahaan yang berlokasi di daerah. Muncul juga pendapat yang menyatakan bahwa desentralisasi seolah-olah tidak bermanfaat atau bahkan mengganggu upaya pemulihan perekonomian nasional. Dunia usaha, terutama para pengusaha dan investor di daerah banyak yang mengeluhkan keberadaan Perda-perda yang bermasalah tersebut. Keluhan utama adalah ketidakpastian mengenai besarnya jumlah yang harus dibayar dan kerumitan administrasi yang ditimbulkan oleh begitu banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah. Dari sisi Pemerintah Daerah, keberadaan peraturan-daerah tersebut tanpa disadari telah menurunkan daya saing perekonomian daerah.

Terbatasnya sumber daya keuangan yang dimiliki daerah dan besarnya tanggung jawab daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya seringkali menjadi alasan penyebab munculnya Perda-perda yang bermasalah. Dengan relatif kecilnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominasi dana perimbangan yang mencakup dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagian besar daerah masih mengandalkan pada alokasi dana perimbangan sebagai sumber utama. Kondisi ini akhirnya memaksa daerah untuk menempuh berbagai cara dalam meningkatkan PAD yang tidak sejalan dengan UU No. 34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tanpa ada upaya melakukan efisiensi. Pada saat ini Pemerintah Pusat (cq. Departemen Dalam Negeri) telah mengevaluasi sebanyak 5.550 Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak lebih dari 1.200 Peraturan daerah direkomendasikan untuk dibatalkan. Sehubungan dengan itu telah

dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan 600 Peraturan daerah tersebut, sedangkan sisanya masih dalam proses pembatalan. Di samping itu, terdapat sekitar 130 Peraturan daerah tentang Pungutan Daerah yang Terkait dengan Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat. Perda-perda tersebut mengatur pungutan berkaitan dengan menara telekomunikasi, jembatan timbang, dan lalu lintas barang. Dari jumlah tersebut, 130 Peraturan daerah telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 60 Perda masih dalam proses pembatalan. Berbagai bentuk peraturan yang menghambat proses mendapatkan usaha akan mengganggu upaya meningkatkan investasi di daerah.

Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Berbagai survei membuktikan, faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah: tenaga kerja dan produktifitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan kinerja investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih dari 2,000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2000) menemukan bahwa alasan utama di balik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia (misal: Hofman, *et al.* 2003; Smeru, 2001; Ray, 2003, 2002). Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak "pro-bisnis" diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar

perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).

Studi Kuncoro, *et al.* (2004) menunjukkan masih adanya "grease money" dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor). Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perijinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dll) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor.

Dalam lingkup global, laporan "*Doing Business in 2005*" yang dipublikasikan oleh *World Bank* dan *the International Finance Corporation* melakukan perbandingan antarnegara dalam hal kemudahan melakukan usaha. Laporan tersebut menyoroti aspek kemudahan memulai usaha, ketenagakerjaan (sistem rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja), sertifikasi properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor, penegakan kontrak, dan penutupan usaha. Dalam hal kemudahan memulai usaha, proses perijinan di Indonesia masih memerlukan pembenahan untuk dapat bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia (lihat Tabel 1.3).

Tabel 1.3  
Perbandingan Kemudahan Memulai Usaha Negara-Negara  
di Kawasan Asia Tenggara, China, dan India

No.	Negara	Jumlah Prosedur	Waktu (hari)	Biaya (% pendapatan perkapita)	Modal Minimum (% pendapatan perkapita)
1.	Cambodia	11	94	480.1	394.0
2.	China	12	41	14.5	1104.2
3.	India	11	89	49.5	0.0
4.	Indonesia	12	151	130.7	125.6
5.	Lao PDR	9	198	18.5	28.5
6.	Malaysia	9	30	25.1	0.0
7.	Philippines	11	50	19.5	2.2
8.	Singapura	7	8	1.2	0.0
9.	Thailand	8	33	6.7	0.0
10.	Vietnam	11	56	28.6	0.0

Sumber: World Bank & IFC, 2005

Seiring dengan meningkatnya persaingan global, semua negara dan daerah berlomba-lomba menarik investor—domestik maupun asing—untuk menanamkan modal di wilayahnya. Pelaku usaha atau investor akan memilih lokasi yang paling memberikan kemudahan dan keuntungan bagi usahanya. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama di dalam peningkatan investasi. Keberhasilan suatu negara/daerah menarik investor menggambarkan kinerja dan daya saing negara/daerah yang bersangkutan. Wilayah perairan dan daratan Indonesia yang luas mempunyai kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hampir setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang khas, berbeda dengan daerah lainnya. Keragaman ini seharusnya merupakan modal potensial sebagai kinerja investasi. Namun, menurut IFC tahun 2006, kinerja investasi Indonesia masih berada di peringkat 135, tertinggal jauh dari Singapura di peringkat 1, Thailand di peringkat 18, Malaysia di peringkat 25, China di peringkat 93, Vietnam di peringkat 104, dan Filipina di peringkat 126. Untuk melihat perbandingan kinerja investasi di berbagai daerah di Indonesia, sejak tahun 2001 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) secara berkala melakukan kajian kinerja investasi daerah kabupaten/kota. Kajian ini dilakukan terhadap 134 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kajian kinerja investasi tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, pengusaha nasional, maupun pengusaha multinasional. Fokus kajian KPPOD adalah persepsi pengusaha terhadap 5 (lima) factor utama, yaitu (1) kelembagaan, (2) sosial politik, (3) ekonomi daerah, (4) tenaga kerja dan produktivitas, dan (5) infrastruktur fisik. Dari setiap faktor tersebut kemudian dipilih variabel dan indikator yang relevan, dan dilakukan pembobotan untuk masing-masing faktor utama, variabel dan indikator.

Daya saing dapat dilihat menurut wilayah (negara atau daerah) dan menurut sektor atau pelaku (industri dan perusahaan). Kedua pemahaman tersebut saling berkaitan. Daya saing suatu industri atau perusahaan akan menentukan daya saing negara atau daerah. Daya saing negara atau daerah akan memberi pengaruh terhadap kemampuan suatu industri dan perusahaan. Daya saing suatu negara sering dikaitkan dengan kemampuan suatu negara dalam memasarkan

produk yang dihasilkan negara itu relative terhadap kemampuan negara lain. Pengertian ini dipeluas oleh *World Economic Forum* (WEF), yaitu kemampuan suatu perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. *Institute of Management and Development* (IMD) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola asset dan proses, kinerja dan agresivitas, globalitas dan proksimitas, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam suatu model ekonomi dan sosial. Daya saing daerah mempunyai arti yang sama dengan daya saing nasional. Suatu daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasa disebut mempunyai daya saing tinggi. Kini, lingkup persaingan tidak lagi hanya dalam wilayah suatu negara, tetapi juga dengan wilayah yang berada di Negara lain. Daya saing perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang diminati konsumen relatif terhadap perusahaan lain. Daya saing perusahaan ditentukan oleh tingkat produktivitas perusahaan itu, yaitu nilai *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja perusahaan itu. Dalam hal ini terdapat hubungan saling mempengaruhi antara pemerintah dan dunia usaha. Daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah-daerah yang ada di negara tersebut. Selanjutnya daya saing negara/daerah ditentukan oleh daya saing perusahaan-perusahaan yang ada di negara/daerah tersebut dan berbagai variabel lainnya. Kualitas kebijakan dan kelembagaan disuatu negara dan daerah akan mempengaruhi kemampuan perusahaan-perusahaan di wilayahnya meningkatkan produktivitas. Dengan pengertian itu, daya saing negara/daerah tidak hanya ditentukan oleh daya saing perusahaan saja. Yang bersaing memang bukan negara/daerah, tetapi perusahaan atau industri yang ada dalam negara/daerah yang bersangkutan dengan perusahaan atau industri yang berada di negara/daerah lain. Suatu negara/daerah yang memiliki daya saing tinggi belum tentu seluruh perusahaan dan industri di negara/daerah tersebut memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional. Daya saing negara/daerah lebih problematik daripada daya saing perusahaan. Bila perusahaan kalah bersaing, maka perusahaan bisa bangkrut dan selanjutnya keluar dari bisnis yang digelutinya.

Namun, negara/daerah tidak memiliki *bottom line* atau tidak akan pernah “keluar dari arena persaingan”.

Menurut catatan WEF, posisi daya saing Indonesia menurun dari urutan ke-69 dari 104 negara yang diteliti pada tahun 2004 menjadi yang ke-71 dari 117 negara pada tahun 2005. Meski posisi tersebut masih lebih baik dari posisi ke-72 pada tahun 2003, namun posisi tersebut relatif lebih buruk dibanding beberapa negara pesaing di kawasan ASEAN. Menurut tolok ukur WEF, terdapat 5 (lima) faktor penting yang menonjol. Faktor-faktor tersebut adalah 3 (tiga) faktor pada tataran makro, yaitu: (a) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (b) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sementara itu, pada tataran mikro atau tataran bisnis, 2 (dua) faktor yang menonjol adalah: (a) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasionalisasi perusahaan; dan (b) lemahnya iklim persaingan usaha. Menurut catatan IMD yang menerbitkan *World Competitiveness Report* setiap tahun, posisi Indonesia turun dari urutan 58 pada tahun 2004 menjadi 59 pada tahun 2005 dari 60 negara yang diteliti. Menurut catatan IMD, rendahnya kondisi daya saing Indonesia disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu: (1) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga, (2) buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan Negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih, dan kompleksitas struktur sosialnya, (3) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional, dan (4) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan. *United*

*Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) juga mengembangkan indikator *Competitiveness Industrial Performance* (CIP) yang diterapkan untuk mengukur peringkat daya saing industri manufaktur di 93 negara dalam periode 1980 - 2000. Dalam *Industrial Development Report 2004*, ukuran indikator CIP tersebut terdiri dari 4 (empat) variabel utama, yaitu: (a) nilai tambah industri manufaktur per kapita, (b) ekspor industri manufaktur per kapita, (c) intensitas industrialisasi yang diukur dari kontribusi industri manufaktur pada PDB dan kontribusi industri manufaktur berteknologi menengah dan tinggi pada sektor industri manufaktur, dan (d) kualitas ekspor yang diukur dari kontribusi ekspor manufaktur dalam total ekspor dan kontribusi manufaktur berteknologi menengah dan tinggi dalam nilai ekspor industri manufaktur. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa kinerja industri manufaktur Indonesia meningkat dari urutan ke-75 pada tahun 1980 menjadi urutan ke-54 pada tahun 1990, dan urutan ke-38 pada tahun 2000. Namun, peningkatan posisi Indonesia memang relatif terpuruk dibanding negara pesaing utama di Asia Timur (termasuk ASEAN). Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan masih terpuruknya kegiatan sektor produksi, peringkat sector industri manufaktur di Indonesia kembali turun setelah tahun 2000. Meskipun kondisi ekonomi makro makin membaik dalam beberapa tahun terakhir, prestasi di atas belum cukup membawa ke arah pemulihan aktivitas sektor produksi, terutama industri manufaktur, ke tataran sebelum krisis apalagi mendongkrak peningkatan daya saingnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Kebutuhan investasi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya, berupa penyediaan fasilitas produksi seperti penyediaan lahan, kawasan industri, sarana prasarana transportasi, listrik, komunikasi, penyediaan air bersih dan lain-lain. Dengan demikian isu menarik yang akan diteliti adalah apakah keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, telepon dan air bersih) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi daerah ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa besarnya pengaruh faktor penentu kinerja investasi daerah.
2. Menentukan jenis faktor-faktor penentu kinerja investasi daerah yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pembentukan kinerja investasi daerah.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menangkap peluang masuknya investasi, mengoptimalkan faktor-faktor penentu kinerja yang dimiliki serta melakukan evaluasi kebijakan terhadap peningkatan kinerja investasi secara keseluruhan.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Hasil studi diharapkan nantinya dapat memberikan dukungan empiris pentingnya pemerintah daerah memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penghambat kinerja investasi di daerah. Perhatian dalam hal ini bukan hanya dalam arti meningkatkan anggaran tetapi juga penajaman alokasi anggaran terutama untuk sektor yang dapat meningkatkan investasi daerah.

### **1.4 Metodologi dan Hipotesis Penelitian**

Metode penelitian adalah uji regresi data panel yang merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*) untuk 26 Propinsi di Indonesia (diasumsikan bahwa Propinsi Timor-Timur telah memisahkan diri dari NKRI dan beberapa propinsi belum melakukan pemekaran) selama tahun 2001 – 2006. Data sekunder diperoleh dari dan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat

### Hiopotesis :

1. Keterbukaan Perdagangan (**Keterbukaan**) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja investasi daerah. Dimana semakin tinggi tingkat keterbukaan perdagangan maka kinerja investor untuk melakukan investasi semakin besar.
2. Panjang Jalan (**JALAN**) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan investasi.
3. Kapasitas sambungan listrik (**LISTRİK**) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan investasi.
4. Kapasitas sambungan telepon (**TELEPON**) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan investasi.
5. Ketersediaan Air Bersih (**AIR**) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan investasi.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam 5 bab yaitu :

#### Bab I. Pendahuluan.

Berisi latar belakang penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang dirumuskan merupakan tema penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dan ruang lingkup penelitian, disusun beberapa pengertian. Sistematika penulisan menggambarkan alur pikir penelitian.

#### Bab II. Tinjauan Pustaka.

Menjelaskan beberapa teori mengenai investasi ditinjau dari teori ekonomi, serta dari faktor non ekonomi dan studi empiris sebelumnya.

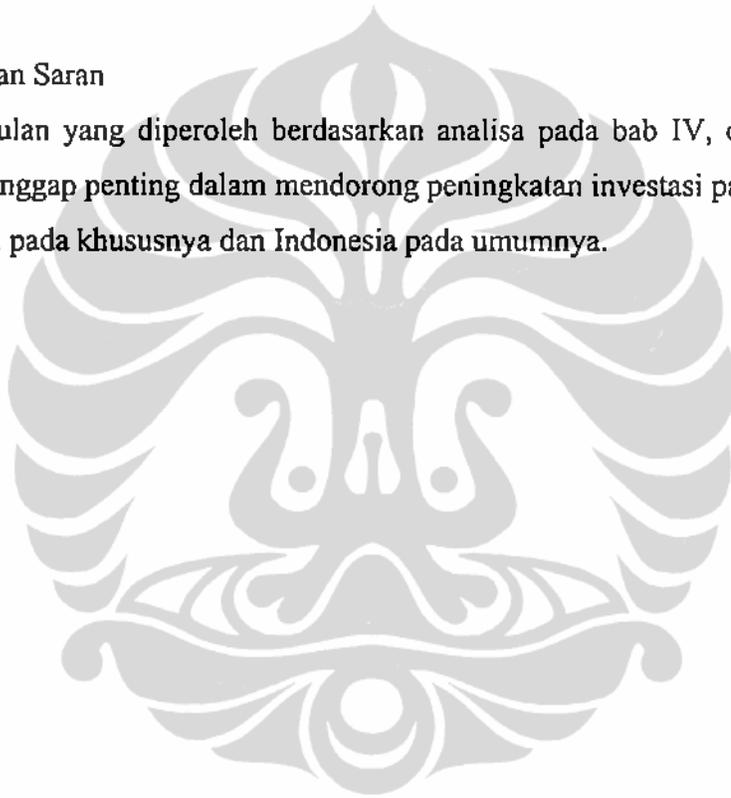
#### Bab III. Metodologi Penelitian.

Berisi hipotesis penelitian yang akan diuji berdasarkan data yang diperoleh dengan metode pengumpul data. Teknik analisa data dengan menggunakan uji regresi data panel kombinasi antara *time series* dan *cross section*.

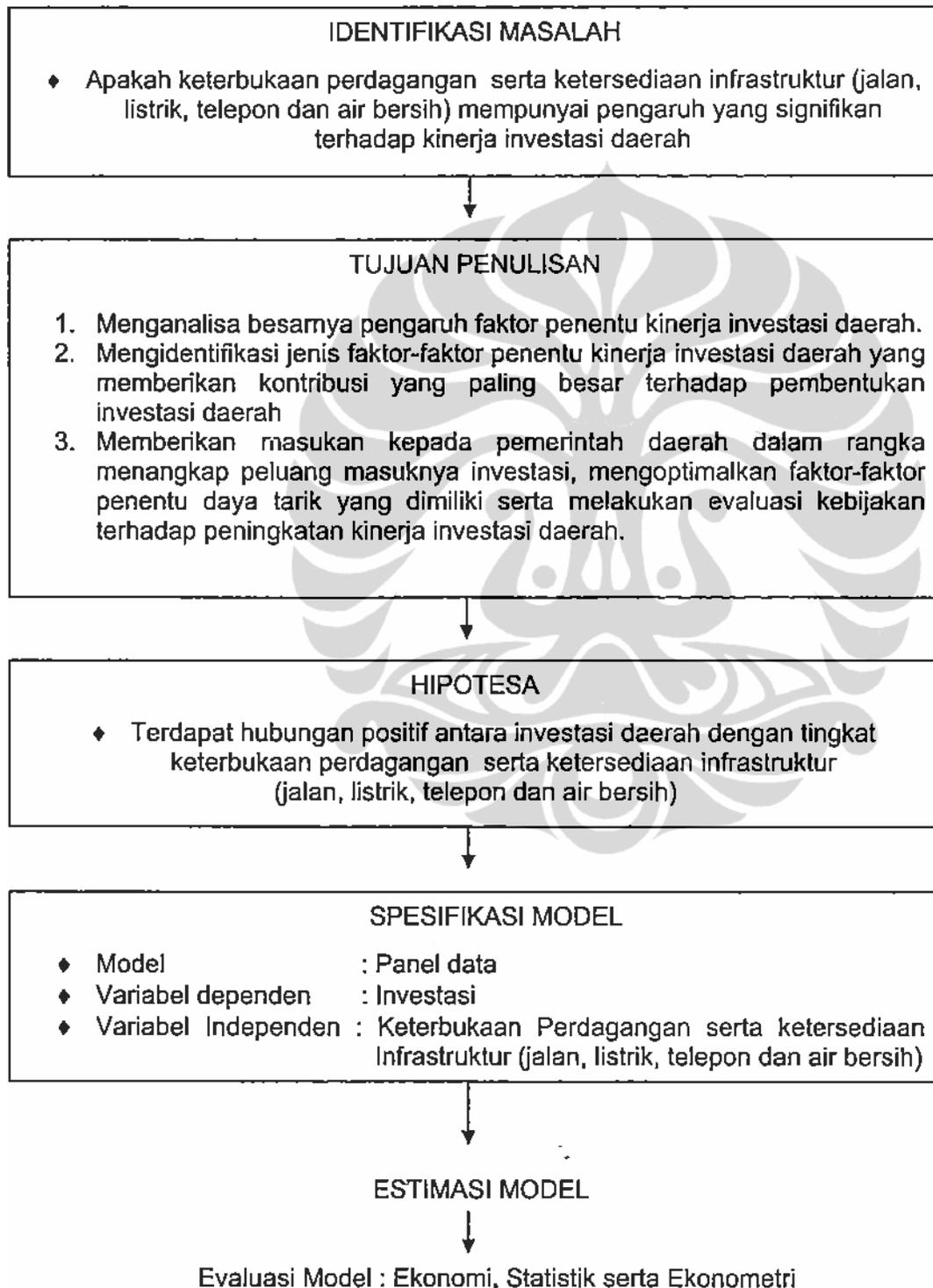
Bab IV. Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan serta Ketersediaan Infrastruktur terhadap Kinerja Investasi Daerah. Berisi hasil estimasi dan pembahasan, pengaruh keterbukaan perdagangan serta ketersediaan jaringan infrastruktur (panjang jalan, kapasitas sambungan listrik, kapasitas sambungan telepon serta ketersediaan air bersih) terhadap investasi daerah pada setiap Propinsi di Indonesia.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisa pada bab IV, dan saran yang dianggap penting dalam mendorong peningkatan investasi pada setiap propinsi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.



KERANGKA PIKIR TENTANG ANALISIS PENGARUH KETERBUKAAN  
PERDAGANGAN DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TERHADAP  
KINERJA INVESTASI DAERAH



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Teori Investasi

Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dalam berbagai bentuk selalu didasarkan pada prinsip ekonomi yaitu meraih laba sebesar-besarnya dengan pengorbanan (modal) sekecil-kecilnya. Oleh karenanya keputusan para usahawan untuk berinvestasi selalu didasarkan pada asumsi adanya harapan (*expectation*) keuntungan setelah investasi.

Investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Berbagai jenis investasi dapat dibedakan atas beberapa faktor seperti : apakah investasi berupa surat berharga atau kekayaan langsung : hutang, penyertaan atau Opsi; resiko rendah atau tinggi, jangka panjang atau pendek (Kertanegara, 1995). Pendapat lain mengatakan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapat keuntungan dari penanaman modal (Sumantoro (1995).

Investasi juga diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan para investor atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994). Adapun yang dapat dikategorikan sebagai investasi adalah :

- a. pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- b. perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, kantor, pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
- c. penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun pendapatan.

Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta bersifat otonomi yang berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak terlalu menentukan jumlah investasi tersebut. Para investor melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan untuk mencari keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah

- a. tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
- b. tingkat suku bunga bank
- c. ramalan mengenai keadaan ekonomi masa datang
- d. kemajuan teknologi
- e. tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Oleh karenanya besarnya keuntungan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan.

Investasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat seperti dalam model ekonomi makro Keynes, tetapi juga mampu meningkatkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi akan meningkatkan stok kapital, karena setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## **2.2. Iklim Investasi**

Beberapa hasil survei lembaga internasional memperlihatkan bahwa posisi peringkat daya saing investasi Indonesia masih berada pada kelompok peringkat bawah dan selalu berada di bawah negara-negara seperti Thailand dan Malaysia. Perbaikan iklim investasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat namun seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat secara umum. Kebijakan pemerintah dengan menerapkan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001 telah memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk turut berperan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang

kondusif di tiap daerah. Dengan berbagai limpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengatur wilayahnya guna menciptakan iklim investai yang kondusif bagi para investor. Kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengambil kebijakan menjadi salah satu penentu dari keberhasilan pembangunan di daerah termasuk di dalamnya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Williamson dan Qudri (1981) dan Mont (1990) dalam Brahmantio (2001) menyatakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kondusifitas iklim usaha suatu daerah adalah biaya transaksi (BT). Pengertian biaya transaksi mencakup; *pertama*, biaya untuk memulai atau mengembangkan sebuah sistem; *kedua*, biaya yang terukur dalam nilai pertukaran; *ketiga*, biaya perlindungan hukum; dan *keempat*, biaya penyelenggaraan perjanjian terhadap enam aktivitas yang berkaitan dengan biaya transaksi.

1. Upaya mencari informasi tentang harga dan kualitas barang, termasuk upaya mendapatkan pembeli dan penjual serta informasi yang relevan.
2. Proses tawar menawar.
3. Pembuatan kontrak.
4. Monitoring terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama.
5. Kemungkinan bahaya yang muncul bila pasangan usaha gagal melakukan yang tercantum dalam kontrak, dan
6. Perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pelanggaran pihak ketiga.

Keenam komponen penyusun biaya transaksi tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya transaksi sebelum terjadi pertukaran (*ex ante transaction cost*) atau setelahnya (*ex post transaction cost*). Dalam praktek bisnis sehari-hari fenomena *ex ante* direfleksikan oleh kondisi akses pengusaha terhadap peluang usaha yang mencakup 5 (lima) hal, yaitu : 1) keamanan; 2) infrastruktur fisik; 3) prosedur dan proses perizinan; 4) informasi dan 5) Kredit (Brahmantio 2001).

Menurut Tambunan (2006) ada sejumlah factor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi,

kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sector pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu perburuhan) regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi dan hak milik dari tanah sampai kontrak.

Dalam pandangan Tambunan (2006) ada tiga faktor utama dalam iklim investasi adalah : pertama kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar dan stabilitas sosial politik, kedua pemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil, ketiga infrastruktur mencakup antara lain transportasi telekomunikasi, listrik dan air. Adapun faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat antara lain adalah proses perizinan yang berbelit-belit dan lambat, pungutan formal dan tidak formal, ketidakstabilan politik, hambatan institusional.

Menurut studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2005 investasi yang masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Daya saing suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas.

Bagi investor informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk investasi. Sehingga diperlukan gambaran yang

komprehensif mengenai iklim investasi yang dapat membantu para investor dalam melakukan investasi.

Berkaitan dengan persepsi pelaku dunia usaha tentang kinerja investasi suatu daerah atau suatu negara, beberapa studi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa penanaman modal baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri atau asing membutuhkan adanya iklim usaha yang sehat serta kemudahan dan kejelasan prosedur penanaman modal. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

### 2.3. Teori Perdagangan Internasional

Suatu perekonomian atau negara yang ekonominya terlibat secara luas dalam perdagangan internasional disebut perekonomian terbuka (open economy). Beberapa teori mengenai perdagangan internasional yang akan dikemukakan dalam tesis ini adalah teori-teori yang dikemukakan oleh *Adam Smith*, *David Ricardo* dan *Heckscher-Ohlin*.

#### 2.3.1. Teori Absolut Advantage Adam Smith

*Adam Smith* dengan teorinya menekankan bahwa perdagangan internasional yang merupakan aktivitas ekonomi adalah bentuk pertukaran antar negara yang didasarkan pada spesialisasi negara tersebut dalam memproduksi barang. Smith memberikan kesimpulan bahwa suatu negara akan mengekspor barang produksinya yang mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi barang tersebut. *Keunggulan absolut* berarti suatu negara dalam memproduksi sebuah barang lebih efisien dibanding negara lain.

Sebagai contoh, diasumsikan bahwa yang menjadi faktor produksi adalah *labor* dengan dua jenis barang produksi yaitu barang *X* dan barang *Y*, dan ada dua negara yaitu *negara A* dan *negara B*. Di negara *A*, 1 unit barang *X* dapat ditukar dengan 4 unit barang *Y* (1 unit barang *Y* untuk  $\frac{1}{4}$  barang *X*). Sementara itu di negara *B* situasinya adalah 1 unit barang *X* dapat ditukar dengan  $\frac{1}{2}$  unit

barang Y (1 unit barang Y untuk 2 unit barang X). Rasio perubahan ini menunjukkan jumlah relatif dari labor yang diperlukan untuk memproduksi kedua barang tersebut dan dapat dilihat sebagai *opportunity costs* dalam memproduksi kedua barang tersebut. *Opportunity costs* ini dapat dikatakan sebagai *price ratio* dalam kondisi *autarky* atau *tanpa adanya perdagangan internasional*. Dari *price ratio* tersebut dapat disimpulkan bahwa negara A mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi barang X dan negara B mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi barang Y.

Sesuai dengan apa yang kemukakan *Smith*, perbedaan *price ratio* ini yang menjadikan dasar terjadinya *perdagangan internasional*, karena kedua negara akan memiliki spesialisasi untuk memproduksi barang yang berbiaya rendah dan kemudian mengekspor barang tersebut serta akan mengimpor barang yang lebih murah jika diproduksi dinegara lain.

### 2.3.2. Teori Comparative Advantage David Ricardo

*David Ricardo* dengan teorinya sebenarnya memberikan catatan atas teori yang dikemukakan *Adam Smith* dengan memberikan beberapa asumsi antara lain, bahwa faktor produksi tidak dapat berpindah antar negara, teknologi di kedua negara adalah tetap serta tingkat teknologi yang mungkin berbeda dan lain sebagainya. Menurut *Ricardo*, jika faktor produksi tidak bebas berpindah antar negara maka dasar dari terjadinya perdagangan internasional adalah keunggulan komparatif atau *Comparative Advantage*.

Sebagai contoh, dengan asumsi bahwa ada dua negara yaitu negara A dan negara B dengan dua jenis komoditi yaitu komoditi X dan komoditi Y. Jika dengan menggunakan faktor produksi di negara A dalam kondisi *autarky* adalah 1 unit X untuk 8/9 unit Y atau 1 unit Y untuk 5/6 unit X. Jika dalam proses produksinya di negara A, untuk memproduksi 1 unit barang X diperlukan 8 jam dan untuk memproduksi 1 unit barang Y dibutuhkan 9 jam. Dan untuk negara B, untuk memproduksi 1 unit barang X dibutuhkan 12 jam dan untuk barang Y dibutuhkan 10 jam. Dengan demikian, jumlah jam kerja relatif yang dibutuhkan

untuk memproduksi barang X adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah jam kerja relatif yang dibutuhkan untuk memproduksi barang Y.

Berdasarkan price ratio di atas, dapat dikatakan bahwa negara A mempunyai keunggulan absolut untuk kedua jenis barang tersebut. Dengan demikian, berdasarkan teori Adam Smith, tidak akan terjadi perdagangan atau pertukaran antara negara A dan B, karena negara A mempunyai tingkat efisiensi lebih baik dibandingkan dengan negara B. Tetapi menurut Ricardo, dengan price ratio tersebut masih memungkinkan untuk terjadi perdagangan internasional. Di negara A, 1 unit barang X dapat ditukarkan dengan  $\frac{8}{9}$  unit barang Y, sehingga negara A akan memperoleh keuntungan dari perdagangan jika melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang X dan mengimpor barang Y dari negara B. Hal ini mungkin terjadi karena 1 unit barang X dari negara A dapat ditukar dengan  $\frac{6}{5}$  unit barang Y. Sedangkan untuk negara B akan lebih menguntungkan jika melakukan spesialisasi untuk memproduksi barang Y. Hal ini bisa terjadi karena 1 unit barang Y dapat ditukar dengan  $\frac{9}{8}$  unit barang X hasil impor. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan tidak mengimpor barang X, karena jika tidak melakukan impor maka 1 unit barang X hanya akan memperoleh  $\frac{5}{6}$  unit barang X.

### 2.3.3. Teori Faktor Endowment Heckscher-Ohlin

Salah satu teori yang paling berpengaruh mengenai perdagangan internasional adalah teori yang dikemukakan oleh Heckscher-Ohlin. Teori ini sebenarnya berangkat dari pemikiran seorang ekonom berkebangsaan Swedia yaitu Eli Heckscher dan kemudian dikembangkan oleh Bertil Ohlin. Secara ringkas teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor suatu jenis barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Jika suatu negara, misalkan mempunyai faktor produksi berupa tenaga kerja yang berlimpah maka negara ini disebut sebagai *labor abundance country*. Ukuran yang berlimpah menyatakan bahwa negara tersebut adalah labor abundance country didasarkan pada rasio tenaga kerja terhadap faktor produksi lainnya. Misalkan, kapital adalah lebih besar dari rasio yang samadengan negara mitra. Dengan kata

lain jika  $L/K$  negara 1 lebih besar dari negara 2 maka negara 1 adalah *Labor Abundance Country*. Oleh karena itu maka negara 1 akan mengekspor barang-barang yang dalam produksinya lebih banyak menggunakan faktor-faktor produksi tenaga kerja dan mengimpor barang-barang dari negara 2 yang menggunakan faktor produksi kapital.

#### 2.3.4. The Product Cycle Theory

Teori ini dikembangkan oleh Raymond Vernon pada tahun 1966. Teori ini berkaitan dengan *life cycle* suatu produk baru dan dampaknya pada perdagangan internasional. Dalam teorinya Vernon membagi *life cycle* dari suatu produk menjadi tiga tahapan. Tahapan *pertama* adalah *New Product Stage*. Pada tahap ini sebuah produk baru diproduksi dan dikonsumsi dinegara penemu produk tersebut dimana demand dari produk tersebut berada dan produsen berusaha tetap dekat dengan pasar untuk mendeteksi *consumer response* dari produk tersebut. Pada tahap ini tidak terjadi perdagangan internasional. Tahapan kedua adalah *The Maturing Product Stage*. Pada tahap ini, produk baru tersebut sudah memiliki standar produk yang umum dan produk mulai diproduksi secara masal. Dengan diberlakukannya standarisasi produksi, maka *economies of scales* produk tersebut dapat dicapai. Dengan semakin banyaknya produk tersebut muncul *foreign demand*. Timbulnya permintaan ini menimbulkan pola perdagangan yang baru antara negara produsen sebagai eksportir dengan negara importir. Perdagangan internasional yang terjadi membuat produsen mencoba untuk mencari kemungkinan untuk memproduksi di negara tujuan ekspor. Penilaian didasarkan pada besarnya biaya produksi, jika biaya produksi di negara eksportir ditambah dengan biaya transpor untuk produk tersebut lebih besar dibanding dengan di produksi di negara importir, maka produsen akan berinvestasi di negara importir untuk memproduksi barang tersebut. Dengan demikian dibukanya produksi baru dinegara importir selain dapat memenuhi permintaan di negara tersebut juga ada kemungkinan untuk membuka peluang pasar di negara sekitarnya. Tahapan *ketiga* adalah *The Standardize Product Stage*. Seiring dengan berjalannya waktu dari produk *life cycle*, karakteristik produk dan proses produksinya telah diketahui baik oleh konsumen dan produsen. Vernon memberikan hipotesa, bahwa produksi

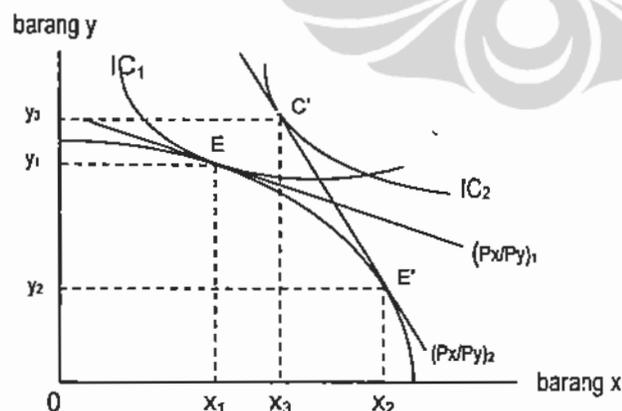
dari barang tersebut akan berpindah ke negara berkembang. Hal ini dikarenakan biaya tenaga kerja yang lebih murah di negara berkembang dan negara maju mulai disibukkan dengan penelitian untuk mendapatkan produk baru lainnya.

### 2.3.5. Manfaat Perdagangan Internasional

Suatu negara dapat mempunyai manfaat dari perdagangan internasional atau Gain from Trade dapat berupa peningkatan kesejahteraan atau welfare bagi negara yang melakukan perdagangan internasional. Dengan perdagangan suatu negara dapat mencapai tingkat Welfare yang lebih tinggi dari yang mungkin dicapai jika negara tersebut dalam kondisi autarky.

Proses perdagangan internasional memberikan dampak pada peningkatan welfare tampak dari gambar 2.1. Pada kondisi autarky, keseimbangan pada suatu negara berada pada titik E, dimana negara tersebut mempunyai barang Y sebanyak  $OY_1$ , dan memproduksi barang X sebanyak  $OX_1$ . Dan term of trade yang dipunyai oleh negara tersebut adalah  $(P_x/P_y)_1$ . Dalam kondisi ini, tingkat kesejahteraan atau welfare ditunjukkan dengan kurva indifference yaitu  $IC_1$ .

Gambar. 2.1. Perdagangan Internasional pada kondisi *Autarky*.



Sumber : Appleyard, 2006

Dengan adanya perdagangan internasional, maka term of trade yang dihadapi negara tersebut berubah menjadi  $(P_x/P_y)_2$ . Term of trade ini menunjukkan adanya asumsi bahwa harga relatif di pasar domestik untuk barang

X lebih murah dan untuk barang Y lebih mahal bila dibandingkan dengan harga internasional. Jika negara tersebut, barang X mempunyai keunggulan komparatif dan barang Y tidak mempunyai keunggulan komparatif. Sehingga barang X adalah barang yang lebih efisien dalam produksinya dibanding dengan barang Y. Oleh karena barang X mempunyai harga yang lebih mahal di pasar internasional maka para produsen akan lebih banyak memproduksi barang X dan mengurangi produksi barang Y dalam rangka memperbesar keuntungan. Oleh karena itu, produksi akan bergeser dari titik E ke titik E'.

Konsumsi domestik barang X adalah sebanyak  $OX_3$ , sehingga negara tersebut dapat mengekspor barang X sebesar  $X_3X_2$ . dan konsumsi domestik untuk barang Y adalah sebesar  $OY_3$ , Sedangkan produksi barang Y sebesar  $OY_2$ . Untuk menutupi kekurangan kebutuhan konsumsi domestik barang Y, maka negara tersebut mengimpor barang Y sebanyak  $Y_2Y_3$ . Dari sini dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran kurva indifference menjadi  $IC_2$ . Karena kurva indifference menggambarkan tingkat welfare negara tersebut, maka dengan demikian welfare negara tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dengan adanya perdagangan internasional.

### 2.3.6. Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan teori perdagangan internasional klasik menyatakan bahwa setiap negara akan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif, yang berarti bahwa output dunia akan menjadi besar dan melalui perdagangan negara-negara akan memperoleh manfaat atau keuntungan dari perdagangan internasional. Kemudian dengan adanya distribusi ketersediaan faktor produksi dan teknologi antara negara berkembang dan negara maju, dan berdasarkan teori mengenai keunggulan komparatif maka negara berkembang akan melakukan spesialisasi pada produk-produk primer dan mengekspor raw materials, minyak bumi, makanan ke negara maju dan negara maju akan mengekspor produk-produk hasil manufaktur.

Menurut *Salvator* (2004), perdagangan internasional mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui :

1. Perdagangan internasional dapat menyebabkan tercapainya kondisi full utilization dari semua faktor produksi. Sehingga dengan perdagangan internasional negara berkembang dapat bergeser dari proses produksi yang tidak efisien menjadi proses produksi yang efisien.
2. Dengan perdagangan internasional maka ukuran pasar akan menjadi lebih besar, sehingga perdagangan memungkinkan pencapaian economies of scale.
3. Perdagangan internasional merupakan kendaraan bagi terjadinya transmisi ide-ide baru, penggunaan teknologi baru dan keahlian yang lain.
4. Perdagangan internasional memberikan rangsangan bagi lahirnya investasi atau aliran dana dari negara maju ke negara berkembang.
5. Dibeberapa negara berkembang perdagangan internasional juga dapat merangsang munculnya *domestic demand*.

Pada tahun 1970-an, kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia utamanya pada sektor industri yaitu berupa kebijakan impor substitution. Pada periode ini terjadi upaya untuk melindungi industri-industri dalam negeri sebagai bentuk proteksi terhadap industri Indonesia. Pada sektor perdagangan dikenakan pengenaan tarif dan pembatasan impor untuk barang-barang yang dikhususkan. Hal yang menarik justru adanya kebijakan yang berbeda dibidang investasi. Dibidang investasi Indonesia justru memberikan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Pada tahun 1973, Indonesia mengalami apa yang disebut *oil booming*. Dengan adanya peristiwa tersebut Indonesia tidak lagi tergantung pada bantuan luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut menimbulkan kepercayaan diri Pemerintah Indonesia, sehingga proteksi yang lebih ketat diberlakukan. Tarif

dan non tariff barriers yang lebih ketat diberlakukan demikian juga bidang investasi, aturan dan perijinan untuk investasi asing diperketat.

Pada periode 1980-an, Pemerintah Indonesia meninjau ulang kebijakan impor substitution, hal ini karena adanya penurunan harga minyak dunia. Pada periode 1985-1990, kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia adalah *Export Orientation* dan *Selective Import Substitution*. Selama periode ini, Indonesia mulai merasakan dampak dari peningkatan output sebagai akibat meningkatnya *Foreign Direct Investment (FDI)* dari Jepang dan negara-negara yang tergolong dalam Asia Newly Industrially Economies (NIEs). Pada tahun 1986, diawali dengan adanya devaluasi nilai mata uang Indonesia, sektor swasta menjadi kendaraan utama dari peningkatan sektor manufaktur. Pada periode ini juga Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang merupakan paket liberalisasi pada perdagangan dan investasi yang meliputi semakin dipermudahnya aturan atau pengurangan hambatan pada investasi asing, pemotongan tarif dan pengurangan pembatasan impor.

Pada periode 1990-1995, kebijakan yang diterapkan berupa *retreat of export orientation* dan *revival of import substitution*. Karakteristik perekonomian Indonesia ditandai dengan peningkatan nilai tukar riil dan pertumbuhan yang lebih banyak didorong oleh *domestic demand*. Kebijakan *revival of import substitution* ditandai dengan tingginya tarif impor yang dikenakan terutama pada barang-barang kimia. Tarif impor yang tinggi untuk barang-barang kimia dikenakan untuk melindungi Chandra Asri Petrochemical Center, yang merupakan pabrik kimia pertama di Indonesia. Sedangkan kebijakan *retreat of export orientation*, dapat dilihat dari turunnya export ratio dari beberapa produk manufaktur. Secara umum, export ratio barang-barang manufaktur turun dari 23,2 persen menjadi 19,8 persen (Ishida, 2003).

Pada periode berikutnya periode dimana Pemerintah Indonesia mengalami krisis perekonomian. Pada periode ini Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai kebijakan yang didasarkan pada saran-saran dari *International Monetary Fund (IMF)*. Kebijakan yang diambil bertendensi untuk

melanjutkan liberalisasi dibidang perekonomian dan juga program privatisasi perusahaan-perusahaan yang menjadi milik negara.

#### 2.4. Infrastruktur

Menurut Todaro (2000) ada 3 (tiga) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yaitu :

1. Akumulasi Modal (Capital Accumulation), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia.
2. Pertumbuhan Penduduk (Population Growth), yang dalam jangka waktu tertentu akan memperbanyak angkatan kerja.
3. Kemajuan Teknologi (Technological Progress).

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan periode selanjutnya. Investasi terdiri dari investasi untuk modal langsung dan investasi untuk modal penunjang. Investasi modal langsung adalah investasi yang digunakan untuk pengadaan modal langsung, misalnya : pabrik, mesin dan bahan baku. Investasi modal penunjang adalah investasi yang dilakukan untuk pengadaan materi penunjang kegiatan ekonomi, materi tersebut biasa disebut "*Infrastruktur*" ekonomi, misalnya : jalan tenaga listrik serta fasilitas komunikasi. Kata Infrastruktur berasal dar bahasa Inggris, "*Infrastructure*" yang berarti prasarana atau rangka dasar. Prasarana adalah suatu bentuk materi yang dapat digunakan untuk menunjang terjadinya suatu kegiatan.

Ada 3 (tiga) jenis infrastruktur yang secara luas digunakan pada proses produksi dan konsumsi oleh masyarakat pelaku ekonomi sebagai *social overhead* yaitu :

1. Public Utilities, terdiri dari tenaga listrik, telekomunikasi, penyediaan air bersih sanitasi dan pengelolaan limbah, pengelolaan sampah serta suplai gas.

2. Public Works, terdiri dari jaringan jalan, bendungan dan kanal untuk irigasi dan drainase.
3. Prasarana Transportasi, terdiri dari jaringan kereta api, jalan darat untuk mobil, pelabuhan dan sarana transportasi air serta bandar udara.

Model Makro ekonomi yang dikembangkan oleh LPEM (2004), menunjukkan keterkaitan yang signifikan antara stok investasi seperti jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi terhadap perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.1

Tabel 2.1

Hasil simulasi Modal Makroekonometri persentase peningkatan PDB akibat kenaikan stok infrastruktur sebesar 10 persen.

No	Kenaikan Stok Infrastruktur (%)	Pertumbuhan PDB (%)
1.	Irigasi	1,26
2.	Jalan	0,88
3.	Listrik	0,84
4.	Telepon	0,61
5.	Pelabuhan	0,26
6.	Air Bersih	0,22

Sumber : LPEM UI 2004

Selanjutnya Peneliti Kumar (2001), yang meliputi 74 negara selama periode tahun 1982-1984, menganalisis faktor ketersediaan infrastruktur dalam mempengaruhi daya tarik investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian tersebut meliputi transportasi, telekomunikasi, informasi dan ketersediaan energi. Perubahan infrastruktur yang menggambarkan kondisi masing-masing negara memperlihatkan bahwa semakin baik kondisi infrastruktur maka daya tarik investasi juga meningkat.

## 2.5. Studi Empiris Terdahulu

Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Berbagai survei membuktikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah: tenaga kerja dan produktifitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan kinerja investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih dari 2.000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2000) menemukan bahwa alasan utama di balik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

Berdasarkan hasil survey *The Global Competitiveness Report* yang dilakukan terhadap 104 negara (2004-2005) dan terhadap 117 negara (2005-2006) peringkat Indonesia yang menyangkut kelembagaan publik dibandingkan dengan posisi negara-negara ASEAN relatif buruk.

**Tabel 2.1 Peringkat Indonesia Untuk Kelembagaan Publik dalam ASEAN berdasarkan *The Global Competitiveness Report* 2004-2005 (104 negara) 2005-2006 (117 negara).**

Jenis kelembagaan public	Malaysia		Indonesia		Thailand		Philippines		Singapura		Vietnam	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Kemandirian judicial	31	20	58	68	44	40	74	85	24	19	59	63
Efisiensi kerangka kerja legal	21	16	51	73	35	36	85	91	14	8	61	64
Hak property	32	23	67	88	41	43	74	64	12	6	66	61
Pemborosan pengeluaran pemerintah	11	2	25	40	16	17	90	100	1	1	68	52
Pemihakan keputusan oleh pejabat pemerintah	30	11	24	30	50	39	90	98	7	3	55	70
Tingkat birokrasi	30	11	85	48	99	92	54	86	16	15	91	64
Efektivitas lembaga pembuat hukum	6	5	29	52	36	24	86	93	1	1	43	40
Kepercayaan terhadap pelayanan polisi	24	37	66	78	48	46	99	96	2	1	40	42
Biaya bisnis akibat korupsi	38	22	72	69	48	43	96	96	10	5	73	79

Keterangan A= 2004-2005; B = 2005-2006  
Sumber WEF (2004-2005)

Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia (misal: Hofman, *et al.* 2003; Smeru, 2001; Ray, 2002 dan 2003). Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak "pro-bisnis" diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).

Studi Kuncoro, *et al.* (2004) menunjukkan masih adanya "grease money" dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor). Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perijinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dll) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor.

Secara periodik Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan The Asia Foundation melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan menentukan kinerja kabupaten/kota terhadap investasi berdasarkan persepsi dunia usaha, kemudian melakukan pemeringkatan dan membuat gambaran kinerja investasi daerah.

Studi awal dilakukan oleh KPPOD dengan menggunakan model *The Analytic Hierarchy Process* (AHP) atau pemeringkatan dengan menggunakan perangkat lunak *Expert Choice*. Pada tahun 2001 penelitian dilakukan terhadap 90 daerah (68 kabupaten dan 22 kota) diseluruh Indonesia meliputi kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan 7 (tujuh) indikator penelitian yaitu keamanan, potensi ekonomi, sumberdaya manusia, budaya daerah, infrastruktur, peraturan daerah serta keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keamanan (kepastian hukum dan gangguan

keamanan) merupakan faktor penentu utama dalam pertimbangan keputusan investasi. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2002 terhadap 134 kabupaten/kota diseluruh Indonesia meliputi 5 (lima) indikator penelitian yaitu kelembagaan, sosial politik, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan produktifitas serta infrastruktur fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kelembagaan (aparatur dan pelayanan, kepastian hukum, keuangan daerah serta peraturan daerah) faktor penentu utama dalam pertimbangan keputusan investasi. Selanjutnya tahun 2003 dengan lingkup penelitian 200 daerah (156 kabupaten dan 44 kota) meliputi 5 indikator penelitian yaitu kelembagaan, sosial politik, perekonomian daerah, tenaga kerja dan produktifitas, serta infrastruktur fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kelembagaan faktor penentu utama dalam pertimbangan keputusan investasi. Pada tahun 2004 penelitian dilakukan terhadap 214 daerah (163 kabupaten dan 51 kota) meliputi lima bidang penelitian yaitu kelembagaan, sosial politik, perekonomian daerah, tenaga kerja dan produktifitas serta infrastruktur fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kelembagaan (kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur serta keuangan daerah) faktor penentu utama dalam pertimbangan keputusan investasi. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2005 dengan lokas 228 daerah (169 kabupaten dan 59 kota) meliputi 5 (lima) indikator penelitian yaitu kelembagaan, keamanan, politik dan sosial budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja serta infrastruktur fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keamanan, politik dan sosial budaya menempati urutan pertama mempengaruhi investasi daerah.

Pendekatan penelitian lain dilakukan oleh KPPOD dengan menggunakan pendekatan Analisis Data Kuantitatif Indikator dengan lingkup penelitian bidang Tata Kelola Ekonomi Daerah meliputi 238 kabupaten dan kota dengan melibatkan 12.187 responden pelaku usaha terhadap 9 (sembilan) indikator utama yaitu akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha, perijinan usaha, interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha, kapasitas dan integritas Bupati/Walikota, biaya transaksi di daerah, pengelolaan infrastruktur fisik daerah, keamanan dan resolusi konflik serta peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur fisik merupakan faktor yang

dianggap paling penting oleh responden dalam tata kelola ekonomi daerah dan sangat menentukan kinerja pelaku usaha.

Sementara itu dari hasil studi LPEM FEUI (2005-2006) yang dilakukan terhadap 600 perusahaan manufaktur yang tersebar di lima kota besar dan wilayah sekitarnya yakni, Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan dan Makasar, menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang perlu digaris bawahi diantaranya memulai usaha baru, pengurusan kepabeanan, restitusi pajak, dokumen pajak, tenaga kerja, infrastruktur fisik dan korupsi. Disebutkan bahwa persetujuan investasi luar negeri berlangsung lambat penuh pertimbangan (diskresi) dan banyak membuang waktu. Ketidak efisienan dan korupsi masih merupakan masalah besar dalam hal pengurusan prosedur impor, kepabeanan, aparat berwenang di pelabuhan dan pihak lain yang terkait. Dalam hal perpajakan restitusi pajak yang tertunda masih merupakan masalah utama bagi perusahaan eksportir manufaktur yang tergantung kepada bahan baku impor.

Studi Tambunan (2005) bertujuan untuk mengetahui kaitan antara investasi dan pembangunan ekonomi daerah serta menganalisa faktor-faktor yang menjadi kinerja investor untuk melakukan investasi di suatu daerah. Studi tersebut menggunakan data pada level propinsi seluruh Indonesia dengan metode analisis yaitu analisis korelasi data cross section dan pemetaan investasi.

Menurut Tambunan (2005) terdapat korelasi antara variabel investasi *degree of openness* dengan pertumbuhan ekonomi daerah pada sebagian besar propinsi di Indonesia (10 dari 30 propinsi). Sedangkan faktor-faktor yang menentukan investasi adalah *degree of openness*, penggunaan jalan, telepon, listrik, indeks pembangunan manusia dan pengeluaran pembangunan regional adalah faktor-faktor yang secara signifikan menentukan investasi di Indonesia pada level regional. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa secara umum daerah dengan tingkat investasi yang tinggi dimiliki oleh daerah yang memiliki *degree of openness*, jalan, pengeluaran pembangunan regional juga tinggi (Sumatra Utara, DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Imelda (2006) yang berjudul Analisis Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Daerah dan hubungannya terhadap Pembangunan Regional dengan menggunakan model Panel Data dengan lokasi

penelitian 26 propinsi di seluruh Indonesia dan merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Tambunan (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Propinsi di kawasan Indonesia Barat memiliki kinerja investasi lebih baik dibanding propinsi di Indonesia Timur.

Penelitian Astuti (2007) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. . Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel dan variabel yang digunakan adalah PDRB, listrik, jalan, air bersih, penduduk serta tingkat bunga (ratdep) dan dummy variable meliputi 5 Kabupaten dan Kota di Propinsi DIY. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel tersebut terhadap daya tarik investasi serta untuk mengetahui perbedaan investasi sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara investasi sebelum pelaksanaan otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Bab ini akan memuat kerangka pikir penelitian serta menguraikan metode penelitian yang digunakan yang meliputi tentang data dan sumber data yang digunakan, spesifikasi model dan variabel penelitian serta definisi operasional variabel. Selanjutnya juga akan diuraikan tentang proses estimasi yang dilakukan dengan data panel yang meliputi tentang model estimasi data panel, pemilihan model estimasi dalam data panel dan uji signifikansi terhadap variabel penelitian.

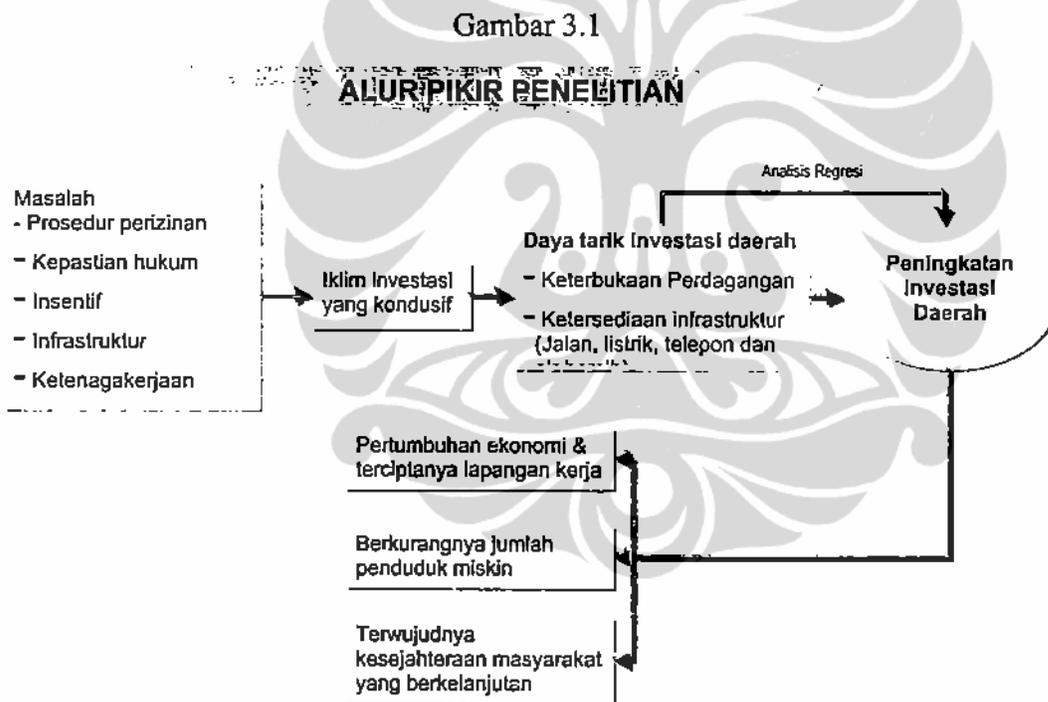
#### 3.1. Kerangka Pikir Penelitian

Investasi adalah merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menjaga kelanjutan pertumbuhan agar ekonomi dapat berkembang dalam jangka panjang diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Investasi dilakukan untuk mengganti barang-barang modal yang rusak dengan tujuan mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Semakin meningkatnya investasi berarti akan semakin berkembang produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Dengan demikian investasi yang lebih produktif akan menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta akan berimplikasi pada keberlanjutan ekonomi.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi diperlukan serangkaian kebijakan yang diantaranya adalah dengan cara peningkatan kinerja investasi. Akan tetapi daya tarik investasi suatu daerah tidak terjadi dengan sendirinya. Pembangunan daya tarik investasi berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Faktor yang diyakini sebagai penentu daya tarik investasi daerah yaitu faktor ekonomi, politik dan kelembagaan serta sosial dan budaya. Investasi masuk ke suatu daerah membutuhkan adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif yang mendukung aktifitas bisnis. Iklim investasi yang dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi

daerah yang bersangkutan. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Dalam hal ini penelitian diarahkan pada Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan serta Ketersediaan Infrastruktur terhadap Kinerja Investasi Daerah. Indikator-indikator yang merupakan ukuran sebagai kinerja investasi daerah adalah tingkat keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, telepon serta air bersih). Untuk lebih ringkasnya kerangka alur pikir penelitian, analisis pengaruh keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur terhadap kinerja investasi daerah dapat dilihat pada Gambar 3.1.



### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yang merupakan gabungan dari data cross-section 26 propinsi di Indonesia dengan data time-series selama periode 2001-2006. Penghitungan hanya dilakukan terhadap 26 propinsi karena, pada tahun 1999, Propinsi Timor-Timur telah memisahkan diri dari NKRI dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, pertimbangan lain adalah untuk memudahkan penghitungan data. Pemekaran beberapa propinsi baru yang terjadi sebelum penelitian datanya dijumlahkan kembali dengan propinsi asal seperti Propinsi Riau dengan Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Sumatra Selatan dengan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi Banten, Propinsi Sulawesi Utara dengan Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Maluku dengan Propinsi Maluku Utara serta Propinsi Papua dengan Irian Jaya Barat. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, dianalisis secara statistik, ekonometri dan ekonomi. Secara statistik yaitu dengan menganalisa data secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh untuk masing-masing variabel. Secara ekonometrika adalah untuk mengetahui efektifitas dari model yang digunakan. Sedangkan secara ekonomi adalah dengan pembahasan dari masing-masing variabel dan hubungan antar variabel yang kemudian disesuaikan dengan teori ekonomi yang melandasi.

Studi ini dilakukan untuk meneliti faktor-faktor penentu yang mempengaruhi daya tarik terhadap investasi daerah pada 26 propinsi di Indonesia. Faktor-faktor yang diyakini sebagai penentu daya tarik investasi antara lain faktor ekonomi, politik, kelembagaan dan sosial budaya. Secara umum agar investasi masuk ke suatu daerah membutuhkan adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif guna mendukung aktifitas bisnis. Iklim investasi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi daerah yang bersangkutan. Dalam penelitian ini indikator yang merupakan ukuran kinerja investasi daerah adalah keterbukaan perdagangan (nilai ekspor dan impor), serta ketersediaan infrastruktur (panjang jalan, kapasitas sambungan listrik, kapasitas sambungan telepon serta ketersediaan air bersih).

### 3.3. Spesifikasi Model dan Variabel yang Digunakan

Model ekonometri yang diaplikasikan merupakan modifikasi dari model yang dikembangkan oleh Tambunan (2005) dalam papernya yang berjudul *Overview Spatial Mapping Investment and Local Economic Development in Indonesia*. Studi tersebut menganalisis pengaruh faktor-faktor pendorong daya tarik daerah terhadap perkembangan investasi di propinsi seluruh Indonesia dengan menggunakan data cross section tahun 2002. Variabel yang digunakan adalah investasi (INV) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independent yaitu faktor-faktor pendorong daya tarik investasi di daerah yaitu 1) Indeks keterbukaan (OPEN) yang merepresentasikan dinamika dan keterbukaan perdagangan antar daerah. 2) indeks pembangunan manusia (human Development Index), HDI digunakan sebagai ukuran tingkat produktifitas tenaga kerja. 3) pengeluaran pembangunan regional (DEVEXP) sebagai proksi pelayanan pemerintah. 4) ketersediaan infrastruktur fisik yaitu panjang jalan (ROAD), 5) penggunaan listrik (ELECTRIC). 6) penggunaan telepon (TELP) jumlah pelabuhan (PORT) 7) 8) jumlah bandar udara (AIRPORT), dalam bentuk persamaan menjadi :

$$INV = f(\text{Open, Road, Electric, Telp, Port, Airport, HDI, Devexp})$$

$$INV = \alpha_0 + \beta_1 \text{ Open} + \beta_2 \text{ Road} + \beta_3 \text{ Electric} + \beta_4 \text{ Telp} + \beta_5 \text{ Port} + \beta_6 \text{ Airport} + \beta_7 \text{ HDI} + \beta_8 \text{ Devexp} + e \dots\dots\dots(3.1)$$

Selanjutnya model dimodifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menggabungkan dengan model yang dibangun oleh Imelda yang menganalisis tentang faktor-faktor penentu daya tarik investasi daerah dan hubungannya terhadap pembangunan ekonomi regional.

Pada dasarnya investasi daerah dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan perdagangan daerah (nilai ekspor dan impor) serta ketersediaan infrastruktur (panjang jalan, kapasitas sambungan listrik, kapasitas sambungan telepon serta ketersediaan air bersih), maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

INV = f (Keterbukaan, Infrastruktur (Jalan, Listrik, Telepon, Air bersih).

$$\text{Log(Invest)}_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \log(\text{Keterbukaan})_{it} + \beta_2 \log(\text{Jalan})_{it} + \beta_3 \log(\text{Listrik})_{it} + \beta_4 \log(\text{Telpon})_{it} + \beta_5 \log(\text{Air})_{it} + e \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana :

$\alpha_1$  = intersep

Keterbukaan = keterbukaan perdagangan

Jalan = panjang jalan

Listrik = energi listrik terjual PLN (Kwh)

Telp = jumlah unit telepon tersambung Telkom

Air = air bersih tersalurkan PDAM (M<sup>3</sup>)

$\beta_1, \dots, \beta_5$  = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

i = individu propinsi

t = periode/waktu

**INVESTASI** yang digunakan sebagai variabel disini adalah melalui pendekatan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau merupakan rasio antara PMTDB dengan PDRB, menurut definisi BPS, PMTDB mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang Modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkut. Termasuk perbaikan besar yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas modal tersebut.

**KETERBUKAAN** adalah keterbukaan perdagangan propinsi yang menggambarkan dinamika perdagangan antar daerah. Keterbukaan perdagangan diperoleh dari perhitungan rasio antara penjumlahan nilai ekspor dan impor (jutaan Rp) dengan Produk Domestik Regional Bruto pada setiap propinsi dengan harga konstan 2000.

**JALAN** adalah panjang jalan yang terdapat pada setiap propinsi seluruh di Indonesia merupakan rasio antara panjang jalan (km) dengan luas wilayah propinsi (Km<sup>2</sup>), meliputi semua golongan jalan negara, propinsi, kabupaten/kota

tanpa mempertimbangkan kondisi jalan (baik, sedang/berat, beraspal atau tidak maupun berapa jalur yang ada).

**LISTRIK** adalah kapasitas sambungan listrik (energi listrik terjual PLN dalam Kwh) yang dihasilkan di setiap propinsi yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa listrik (rumah tangga, badan sosial, badan pemerintah, industri dll).

**TELEPON** adalah jumlah jaringan telepon dalam unit yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa telepon (rumah tangga, badan sosial, badan pemerintah, industri dll) pada setiap propinsi.

**AIR** adalah jumlah kapasitas air bersih ( $M^3$ ) yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa air minum (rumah tangga, badan sosial, badan pemerintah, industri dll) pada setiap propinsi.

#### 3.4. Analisa dengan Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh beberapa variable independen yaitu keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur (panjang jalan, jaringan listrik, telepon dan air bersih) terhadap variabel dependen yaitu kinerja investasi daerah setiap propinsi di Indonesia, penulis menggunakan analisis regresi data panel. Penggunaan model regresi data panel memungkinkan peneliti untuk dapat menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda-beda. Selain itu penggunaan data panel dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah observasi penelitian, karena apabila hanya menggunakan data *time series* atau *cross section* saja, observasi penelitian relatif sedikit.

Menurut Hsiao dalam Greene (2005) keuntungan panel keuntungan, antara lain:

1. Data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap, karena merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Dengan demikian, model regresi data panel akan menghasilkan *degree of freedom (df)* yang lebih besar yang selanjutnya

akan meningkatkan presisi dari estimasi regresi.

2. Dengan menggabungkan informasi dari data time series dan data cross section, dapat mengatasi masalah yang timbul akibat penghilangan variabel (omitted variable),

Sedangkan menurut Baltagi dalam Manurung (2005), beberapa keuntungan penggunaan data panel adalah sebagai berikut :

1. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu karena unit data lebih banyak,
2. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model (unobserved heterogeneity),
3. Data panel mampu mengindikasikan dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diperoleh dengan data cross section atau time series murni.
4. Data panel mampu mengurangi kolinieritas antar variabel, dan
5. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan studi berulang data *cross section*.

Greene (2005) menambahkan bahwa kelebihan analisis regresi panel yang fundamental adalah adanya fleksibilitas yang lebih besar bagi peneliti dalam memodelkan perbedaan perilaku di antara individu-individu. Namun demikian data panel sebagai salah satu alat analisis dalam ekonometrika juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain (Baltagi, 1995) :

- 1) Masalah koleksi data dan desain.
- 2) Kemungkinan distorsi dari kesalahan pengukuran.
- 3) Dimensi seri waktu yang lebih pendek.

Data yang dipergunakan dalam analisis ekonometrika dapat berupa data time series, data cross section, atau data panel. Data panel (panel pooled data) merupakan gabungan data cross section dan data time series. Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, data panel dicirikan oleh  $T$  periode waktu ( $t = 1, 2, \dots, T$ ) yang kecil dan  $n$  jumlah individu ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) yang besar. Namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya, yakni data panel terdiri dari periode waktu yang besar dan jumlah individu yang kecil. Regresi

dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. Di dalam model regresi klasik, gangguan (error terms/disturbance) selalu diasumsikan bersifat homoskedastik dan serial uncorrelated. Implikasinya, penggunaan metode OLS akan menghasilkan penduga yang bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Asumsi tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan kepada metode data panel yang disusun atas beberapa individu untuk beberapa periode (Ekananda, 2005). Hal ini dikarenakan bertambahnya gangguan yang kini menjadi 3 macam yaitu: gangguan antar waktu (time series related disturbances), antar individu (cross section disturbance), dan gangguan antar waktu dan antar individu (Pyndick dan Rubinfeld, 1991).

Dalam model regresi data panel adanya gejala heterokedastik diperbaiki dengan melakukan *cross section weight* sehingga diharapkan tidak ada korelasi antara error dengan variable bebas dalam model dan perilaku error term tidak memiliki pola yang sistematis. Sedangkan dalam mengatasi korelasi serial (autocorrelation) metode fixed effect diasumsikan dapat mengatasi masalah korelasi serial. Dengan demikian diharapkan bahwa nilai yang dihasilkan dapat menunjukkan nilai yang baik, efisien dan tidak bias serta dapat menggambarkan pengaruh yang murni dari variable bebas terhadap variable tidak bebas sehingga layak dijadikan sebagai dasar analisa.

Melalui analisis data panel, kita dapat menangkap perilaku individu yang berbeda selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh parameter estimasi. Spesifikasi model regresi data panel yang memuat efek yang spesifik individu adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_{it}x_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.4)$$

dimana,  $y_{it}$  dan  $x_{it}$  masing-masing merupakan nilai variabel tak bebas dan variabel-variabel bebas untuk setiap individu  $i$  pada periode  $t$  dimana  $i = 1, \dots, n$  dan  $t = 1, \dots, T$ . Pada  $x_{it}$  ada sebanyak  $k-1$  slope (tidak termasuk *intercept*) yang menunjukkan jumlah variabel bebas yang digunakan dalam model. Sedangkan  $\alpha_i$  merupakan efek individu yang dapat bernilai konstan sepanjang periode  $t$  atau bahkan berbeda-beda untuk setiap individu ke- $i$ .

Data panel yang dikatakan seimbang (*balanced*) maka jumlah observasi menjadi  $n \times T$ . Namun apabila data panel tidak seimbang (*unbalanced*), maka

jumlah observasi menjadi  $\sum_{i=1}^n T_i$ . Pada saat  $n = 1$  dan  $T$  cukup besar, maka data bersifat *time series*. Sebaliknya, pada saat  $T = 1$  dan  $n$  cukup besar maka data bersifat *cross section*. Data panel mengacu pada kasus dimana  $T > 1$  dan  $n > 1$ . Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada data panel yang bersifat *balanced panel*, yaitu dimana kita memiliki jumlah observasi yang sama untuk setiap unit individunya. Dengan demikian, total observasi yang dimiliki adalah sejumlah  $n \times T$ .

### 3.5. Estimasi Regresi Data Panel

Ditinjau dari berbagai asumsi dan faktor-faktor pembentuknya, struktur model estimasi data panel dapat dikelompokkan menjadi model *common effects*, *fixed effect* dan *random effect*.

#### 3.5.1. Model Common Effects.

Model estimasi *common effects* adalah metode estimasi data panel yang tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Sehingga intersep  $\alpha$  dan slope  $\beta$  adalah sama untuk setiap individu ( $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_i$  dan  $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i$ ). Model *common effect* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i \quad (3.5)$$

Sehingga pada model *common effects* tidak akan dapat melihat perubahan antara individu karena perilaku antar individu dalam berbagai periode waktu dianggap sama.

#### 3.5.2. Model Individual Effects

Model ini mengestimasi parameter ( $\alpha$  dan  $\beta$ ) dengan memperhatikan sifat dari individu tanpa memperhatikan struktur covarian error term ( $\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_i$  dan  $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i$ ). Bentuk umum dari model ini adalah :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_{it} X_{it} + \epsilon_{it} \quad (3.6)$$

dimana  $i$  adalah jumlah unit *cross section* dan  $t$  adalah jumlah *series waktu*. Model ini dikenal juga dengan panel (Gujarati, 2003), yang terdiri dari model *fixed effects* dan *random effect* dengan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Model Fixed Effects

Pendekatan dengan metode ini mengasumsikan bahwa perbedaan dalam antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Model ini menggunakan variable dummy, sehingga intersep bervariasi terhadap individu, namun slope coefficient tetap antar individu dan antar waktu. Oleh karena itu maka setiap  $\alpha_i$  adalah parameter yang belum diketahui yang akan diestimasi untuk setiap unit. Dan model umum untuk fixed effect adalah :

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \varepsilon_{it} \quad (3.7)$$

dimana nilai  $\alpha$  berbeda untuk setiap individu, sedangkan  $\beta$  sama untuk semua individu.

### 2. Model Random Effects

Metode random menentukan nilai  $\alpha$  dan  $\beta$  didasarkan pada asumsi bahwa intercept  $\alpha$  tersebar acak dalam unit  $\mu_i$  dan konstan sepanjang waktu. Pada model ini, perbedaan antar individu dan antara waktu diakomodasi melalui error-nya. Sehingga metode random memperhitungkan disturbance yang berasal dari individu dan waktu guna memperoleh efisiensi pendugaan kuadrat terkecil. Metode random ditulis dalam persamaan umum sebagai :

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_i + \varepsilon_{it} \quad (3.8)$$

Dimana  $\mu_i$  adalah residual secara individu dan  $\varepsilon_{it}$  adalah residual secara menyeluruh.

### 3.6. Uji Spesifikasi Model

Dari ketiga model yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu model *common effects*, model *fixed effects*, dan model *random effects*, maka selanjutnya akan ditentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Apabila dilihat dari data yang digunakan dalam penelitian, terdapat dua pendapat mengenai pemilihan metode estimasi yang digunakan. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa apabila data yang digunakan dalam penelitian merupakan data populasi yang berarti semua anggota populasi diambil (diobservasi) sebagai data penelitian, maka model ini dapat langsung diestimasi dengan model *fixed effects* tanpa perlu dilakukan pengujian secara statistik. Sedangkan pendapat kedua

menyatakan bahwa meskipun data yang digunakan merupakan data populasi, namun dari sisi time series masih terdapat komponen random karena tidak semua periode pengamatan dari masing-masing daerah diobservasi. Sehingga menurut pendapat ini, masih harus tetap dilakukan pengujian secara statistik untuk pemilihan metode estimasi yang digunakan.

Menurut Judge dalam Gujarati (2003) ada 4 pertimbangan yang dapat digunakan untuk memilih antara model fixed effect dengan random effect, yaitu :

1. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross section* (n) kecil, maka nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan penghitungan, yaitu model *fixed effects*.
2. Jika komponen *error*  $u_i$  individu berkorelasi, maka penaksir dengan model *random effects* adalah bias dan penaksir dengan model *fixed effects* tidak bias.
3. Jika n besar dan T kecil serta asumsi model *random effects* terpenuhi, maka penaksir model *random effects* lebih efisien dari penaksir model *fixed effects*.
4. Bila n besar dan T kecil, maka penaksiran dengan model *fixed effects* dan model *random effects* akan menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada model *random effects* diketahui bahwa  $\alpha_i = \alpha + u_i$ , dimana  $u_i$  merupakan komponen acak *cross section*. Sementara itu, pada model *fixed effects*  $\alpha_i$  bersifat tidak acak. Apabila diyakini bahwa individu atau cross section tidak acak, maka model fixed effect lebih tepat, sebaliknya jika cross section acak, maka model random effect lebih tepat.

Sedangkan untuk memilih model regresi panel yang tepat secara formal, ada beberapa prosedur pengujian yang akan digunakan, yakni uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* atau model *individual effects* dan uji *Hausman* yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effects* atau model *random effects*. Selanjutnya, untuk model estimasi regresi data panel terpilih, akan dilakukan pengujian untuk memilih estimator dengan struktur varians-covarians dari residual yang lebih baik. Dalam penelitian ini, model estimasi terbaik akan dipilih dengan uji formal.

### 3.6.1. Pemilihan Model antara Common Effect dengan Individual Effect

Untuk memilih model estimasi antara common effects dengan individual effects digunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$  (intersep sama untuk setiap individu/common effects)

$H_1 = \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$  (intersep berbeda untuk setiap individu/individual effects) Adapun uji signifikansinya dilakukan dengan uji F sebagai berikut :

$$F_{\text{stat/hitung}} = \frac{(R^2_{FEM} - R^2_{POOLED})/(n-1)}{(1 - R^2_{FEM})/(nT-n-k)} \quad (3.9)$$

Dimana :

$R^2_{FEM}$  =  $R^2$  dari model individual effects

$R^2_{POOLED}$  =  $R^2$  dari model common effects

n = jumlah individu

T = jumlah time series

k = jumlah variabel bebas

(n-1) = jumlah variable yang diretribusi (common effects)

(nT-n-k) = derajat bebas

Jika F hitung lebih besar dari F table, maka berarti  $H_0$  ditolak dan model yang digunakan adalah model individual effects.

### 3.6.2. Pemilihan Model antara Fixed Effect dan Random Effect

Untuk mengetahui apakah model fixed effect lebih baik dari random effect dan sebaliknya, dilakukan pengujian dengan menggunakan *Hausman Test*. Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu ditetapkan hipotesis, yaitu :

$H_0$  : terdapat gangguan antar individu (random effect)

$H_1$  : tidak ada gangguan antar individu (fixed effect)

Hasil dari Hausman Test dibandingkan dengan nilai chi-square table. Jika nilai W (chi-square test) lebih besar dari chi-square table, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak terdapat gangguan antar individu, maka model yang harus digunakan adalah *fixed effect*.

### 3.6.3. Pemilihan Model Estimator dengan melihat Struktur Varian dan Kovarian dari Residual

Untuk memilih struktur varian kovarian dari residual yang lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan uji Langrange Multiplier (LM test) yang berdistribusi Chi-square ( $\chi^2$  (DF = n-1; prob=95 %)) dengan formula sebagai berikut :

$$LM = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\hat{\sigma}_i^2}{\hat{\sigma}^2} - 1 \right]^2 \quad (3.10)$$

Dimana :

T = jumlah observasi

N = jumlah individu

$\hat{\sigma}_i^2$  = varians residual persamaan ke-i pada kondisi homokedastik

$\hat{\sigma}^2$  = sum square residual persamaan kondisi homokedastik

Sedangkan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \sigma_i^2 = \sigma^2 \text{ (struktur homokedastik)}$$

$$H_1 = \sigma_i^2 \neq \sigma^2 \text{ (struktur heterokedastik)}$$

$H_0$  akan ditolak jika nilai LM lebih besar dari nilai  $\chi^2$  (DF = n-1; prob=95 %) yang berarti bahwa struktur varians kovarian residual bersifat heterokedastik.

### 3.7. Pengujian Signifikansi

Selanjutnya parameter hasil estimasi dilakukan uji signifikansi secara statistik apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model persamaan regresi melalui uji kesesuaian ( $R^2$ ), uji secara bersama-sama koefisien regresi (Uji F) maupun pengujian signifikansi koefisien regresi secara parsial (uji t).

#### 1. Uji Kesesuaian ( $R^2$ )

Untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi lebih dari 2 variabel, maka perlu dilakukan Uji  $R^2$ . Koefisien R square memberikan gambaran keseluruhan proporsi dalam variable yang dijelaskan oleh variable penjelas secara bersama-sama. R square dihitung dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{ESS}{TSS} \quad (3.11)$$

Besarnya  $R^2$  berada di antara 0 dan 1, jika  $R^2 = 1$  artinya bahwa semua variasi dalam variable terikat Y dapat dijelaskan oleh variable-variabel penjelas X yang digunakan dalam model regresi, sebesar 100%. Jika  $R^2 = 0$  berarti tidak ada variasi dalam variable terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variable-variabel bebas X. Model dikatakan baik jika mendekati  $R^2$  mendekati 1.

## 2. Uji Secara Serempak (Uji F)

Pengujian secara serempak dilakukan untuk melihat apakah semua variable bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variable yang dijelaskan. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i = 0$  (variable-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variable terikat)

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_i \neq 0$  (variable-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variable terikat)

Untuk mencari F-hitung digunakan rumus :

$$F_{stat/hitung} = \frac{(R^2_{FEM} - R^2_{POOLED}) / (n-1)}{(1 - R^2_{FEM}) / (nT - n - k)} \quad (3.12)$$

dimana :

$R^2_{FEM} = R^2$  dari model yang tidak direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki heterokedastisitas dan ada serial korelasi antar error term.

$R^2_{POOLED} = R^2$  dari model yang tidak direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki homokedastisitas dan tidak ada serial korelasi antar error term.

n = jumlah individu

T = jumlah time series

k = jumlah variabel bebas

(n-1) = jumlah variable yang direstriksi (common effects)

(nT-n-k) = derajat bebas

Jika *F-hitung* lebih besar dari *F-tabel* maka  $H_0$  ditolak, artinya bahwa variable-variable bebas secara bersama-sama mempengaruhi variable terikat.

### 3. Uji t (Parsial)

Uji parsial dilakukan dengan menggunakan uji t statistic dan dimaksudkan untuk melihat apakah variable-variabel penjelas yang digunakan dalam model secara individual dapat mempengaruhi variable yang dijelaskan.

Dalam melakukan uji parsial, diajukan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0$  (variable bebas ke-i tidak mempengaruhi variable terikat).

$H_1 : \beta_i \neq 0$  (variable bebas ke-i mempengaruhi variable terikat).

Sedangkan untuk menentukan daerah kritis dilakukan melalui perbandingan antara t-hitung dengan t tabel, yaitu :

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{S}_j} \quad (4.12)$$

Dimana :

$\hat{\beta}_j$  = koefisien penduga variable ke j

$\hat{S}_j$  = koefisien standar error variable ke j

Jika nilai t hitung lebih besar dari t table, maka  $H_0$  ditolak yang artinya variable bebas ke-i signifikan mempengaruhi variable terikat sedangkan jika t hitung lebih kecil dari t table, maka  $H_0$  diterima yang berarti variable bebas ke-i tidak signifikan mempengaruhi variable terikat.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil estimasi koefisien parameter variable persamaan regresi mengenai hubungan antara keterbukaan perdagangan dan ketersediaan infrastruktur setiap Propinsi di Indonesia terhadap daya tarik investasi daerah selama periode penelitian. Pada bagian awal akan disajikan hasil uji spesifikasi untuk menentukan model yang terbaik dan hasil uji signifikansi, kemudian pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisis pembahasan hasil estimasi penelitian mengenai pengaruh beberapa variable bebas terhadap kinerja investasi daerah.

Pembahasan yang akan disajikan pada bagian ini merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan program software eviews 5.1 dengan data panel yang merupakan gabungan cross section weight 26 propinsi di Indonesia dengan data time series dari tahun 2001 sampai dengan 2006. Penghitungan hanya dilakukan terhadap 26 propinsi karena, pada tahun 1999, Propinsi Timor-Timur telah memisahkan diri dari NKRI dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, pertimbangan lain adalah untuk memudahkan penghitungan data. Pemekaran beberapa propinsi baru yang terjadi sebelum penelitian datanya dijumlahkan kembali dengan propinsi asal seperti Propinsi Riau dengan Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Sumatra Selatan dengan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi Banten, Propinsi Sulawesi Utara dengan Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Maluku dengan Propinsi Maluku Utara serta Propinsi Papua dengan Irian Jaya Barat.

#### 4.1. Uji Spesifikasi Model

Seperti telah diuraikan pada bab III sebelumnya, setiap model panel dapat diestimasi dengan menggunakan model common, fixed effect maupun random effect. Untuk memastikan model mana yang terbaik maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penentuan model estimasi yang terbaik antara individual effect dengan common effect. Untuk memastikan hal tersebut dilakukan uji F. Dari hasil uji F tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hasil F hitung adalah 68,198 (dapat dilihat pada lampiran 4 ) yang berarti lebih besar dari nilai F tabel dengan nilai  $\alpha = 1$  persen yang sebesar 1,95. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  yang menyatakan bahwa intersep untuk semua individu sama (common effect) ditolak. Sehingga hasil tersebut menyimpulkan bahwa model yang dipilih adalah yang menunjukkan adanya efek individu atau model individual effect (intersep untuk setiap propinsi berbeda).
2. Untuk menentukan estimator terbaik dilakukan dengan melihat struktur varian kovarian dari residual melalui uji LM. Dari hasil uji LM tersebut (dapat dilihat pada lampiran 6 ) diperoleh nilai LM test adalah 69,67 yang berarti lebih besar dari nilai *Chi-square tabel* dengan nilai  $\alpha = 1$  persen yang sebesar 44,31. Sehingga dengan  $H_0$  yang menyatakan bahwa struktur varian kovarian dari residual adalah homokedastik, maka secara statistik  $H_0$  tidak dapat diterima. Artinya metode estimasi yang lebih baik digunakan adalah metode fixed effect dengan struktur varian kovarian heteroskedastik.

Dari hasil pengujian pemilihan model estimasi yang terbaik tersebut yaitu efek individu dengan model fixed effect dengan struktur varian kovarian dari residual heterokedastik diperoleh hasil estimasi sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Regresi

Variable	Coefficient Prob
C	11.67341** (0.0000)
KETERBUKAAN	0.059868** (0.0068)
JALAN	0.245255** (0.0000)
LISTRİK	0.051644** (0.0000)
TELEPON	0.126338** (0.0006)
AIR	0.014022 (0.2507)
R-squared	0.999159
Adjusted R-squared	0.998957
F-statistic	4950.301
Prob(F-statistic)	0.000000

Keterangan :

- \*\* = Signifikan pada taraf nyata 1 %
- \* = Signifikan pada taraf nyata 5 %
- = Signifikan pada taraf nyata >10 %

#### 4.2. Uji Signifikansi dan Arah Pengaruh Variabel-Variabel Bebas terhadap Kinerja Investasi Daerah

Dari hasil uji signifikansi yang telah dilakukan untuk melihat kesesuaian model dan signifikansi dari variabel bebas secara individu maupun bersama-sama terhadap kinerja investasi daerah diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilihat dari nilai adjusted R-square yang diperoleh dari hasil pengolahan data sebesar 0,9991 menunjukkan bahwa keragaman/variasi dari variabel kinerja investasi daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam persamaan model tersebut sebesar 99,91 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,09 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan cukup sesuai/representatif.
2. Untuk melihat apakah semua variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan, dapat dilihat dari nilai prob(F-statistic) yang pada Tabel 4.1 menunjukkan nilai 0. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,01) yang berarti menunjukkan bahwa variabel keterbukaan perdagangan serta ketersediaan jaringan infrastruktur (jalan, listrik serta telepon), secara bersama-sama mempengaruhi kinerja investasi daerah secara signifikan pada nilai  $\alpha = 0,01$ , dan variabel air bersih tidak signifikan yaitu pada nilai  $\alpha = 0,25$ .
3. Untuk melihat apakah secara individu variabel-variabel bebas mempengaruhi daya tarik investasi daerah dapat dilihat dari nilai t statistik atau dari nilai prob (t) seperti terlihat dari Tabel 4.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas pada nilai  $\alpha$  yang berbeda-beda. Variabel keterbukaan perdagangan signifikan mempengaruhi daya tarik investasi daerah pada nilai  $\alpha = 0,01$  dan variabel ketersediaan infrastruktur jalan, listrik serta telepon signifikan mempengaruhi kinerja investasi daerah pada nilai  $\alpha = 0,01$  kecuali variabel air bersih pada nilai  $\alpha = 0,25$ .

Hubungan antara tingkat keterbukaan perdagangan dan ketersediaan infrastruktur terhadap daya tarik investasi daerah adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen jumlah ekspor maupun impor akan mendorong peningkatan daya tarik investasi daerah sebesar 0,06 persen, ceteris paribus. Hubungan antara panjang jalan dengan daya tarik investasi daerah adalah positif dan signifikan, setiap kenaikan 1 persen panjang jalan akan meningkatkan kinerja investasi daerah sebesar 0,245 persen, ceteris paribus.

Hubungan antara tingkat pemakaian listrik dengan daya tarik investasi adalah positif dan signifikan, setiap kenaikan 1 persen tingkat pemakaian listrik (kwh energi terjual) akan meningkatkan investasi daerah sebesar 0,052 persen, ceteris paribus. Hubungan antara ketersediaan jaringan telepon terhadap kinerja investasi daerah adalah positif dan signifikan dimana setiap kenaikan 1 persen jumlah unit telepon tersambung akan meningkatkan investasi daerah sebesar 0,126 persen, ceteris paribus. Sedangkan hubungan antara ketersediaan jaringan air bersih terhadap daya tarik investasi daerah adalah positif meskipun tidak signifikan, dimana setiap kenaikan 1 persen pemakaian air bersih yang disalurkan oleh PDAM hanya mampu meningkatkan investasi daerah sebesar 0,014 persen, ceteris paribus.

### 4.3. Pembahasan Hasil Estimasi.

#### 4.3.1. Analisis Koefisien Variabel-Variabel Bebas Hasil Estimasi

Dari hasil estimasi yang dilakukan dengan fixed effect, dapat dijelaskan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu daya tarik investasi daerah. Secara ringkas seperti terlihat dari tabel 4.1 di atas, hasil estimasi dari model penelitian ini adalah :

$$\text{Log (Invest)}_{it} = 11.67 + 0.06 \log(\text{keterbukaan})_{it} + 0.052 \log(\text{jalan})_{it} + 0.245 \log(\text{listrik})_{it} + 0.126 \log(\text{Telepon})_{it} + 0.014 \log(\text{Air})_{it} + e$$

##### 4.3.1.1. Hubungan Antara Keterbukaan Perdagangan dengan Kinerja Investasi Daerah

Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien keterbukaan perdagangan bernilai positif yaitu sebesar 0,06. Meskipun koefisien regresi cukup kecil, namun pengaruhnya signifikan secara statistik yaitu pada  $\alpha = 1$  persen. Karena model yang digunakan adalah double log, sehingga koefisien parameter yang dihasilkan merupakan nilai elastisitas. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keterbukaan perdagangan terhadap kinerja investasi daerah adalah positif dan signifikan, yaitu setiap kenaikan 1 persen nilai

ekspor maupun impor akan meningkatkan investasi daerah sebesar 0,06 persen, ceteris paribus.

Hubungan yang searah tersebut sejalan dengan perkembangan selama periode penelitian bahwa kenaikan nilai ekspor maupun impor akan diikuti oleh peningkatan kinerja investasi daerah. Pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap kinerja investasi daerah adalah sebesar 0,06 persen. Tolok ukur yang baik untuk menilai kadar keterbukaan perdagangan adalah rasio ekspor dan impor terhadap total GNP. Jika rasio ekspor-impor terhadap GNP melebihi 50 persen maka dikatakan perekonomian lebih terbuka. Semakin dinamis tingkat perdagangan dan besarnya domestic market size menandakan adanya potensi volume perdagangan yang besar sehingga dapat mengundang investor untuk mengisi pasar domestik. Walaupun secara statistik nilai elastisitasnya kecil akan tetapi pada jangka panjang dapat berpengaruh positif terhadap kelanjutan usaha atau akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap investasi daerah.

#### **4.3.1.2. Hubungan Antara Ketersediaan Infrastruktur dengan Kinerja Investasi Daerah**

Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien ketersediaan infrastruktur (panjang jalan, jaringan listrik, jaringan telepon dan air bersih) yang didekati dengan panjang jalan negara, propinsi serta kabupaten tanpa mempertimbangkan kondisi jalan (baik, sedang atau berat, beraspal atau tidak maupun berapa jalur yang ada), energi listrik yang didekati dengan energi listrik terjual PLN (Kwh) yang dihasilkan oleh setiap propinsi yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa listrik (rumah-tangga, badan sosial, badan pemerintah, industri dan lain-lain), jaringan telepon yang didekati dengan jumlah jaringan telepon dalam unit yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa telepon (rumah-tangga, badan sosial, badan pemerintah, industri dan lain-lain), bernilai positif yaitu sebesar 0.245; 0.052; dan 0.126 dengan pengaruh yang signifikan pada  $\alpha = 1$  sedangkan air bersih yang didekati dengan jumlah kapasitas air bersih  $M^3$  yang diproduksi oleh PDAM dan digunakan oleh konsumen pengguna jasa air

minum ((rumah-tangga, badan sosial, badan pemerintah, industri dan lain-lain), bernilai positif dan tidak signifikan yaitu pada  $\alpha = 25$  persen.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ketersediaan jaringan infrastruktur (jalan, listrik dan telepon) terhadap kinerja investasi daerah adalah positif dan signifikan yaitu setiap 1 persen kenaikan panjang jalan akan berpotensi terhadap kenaikan investasi daerah sebesar 0.245 persen, ceteris paribus, setiap 1 persen kenaikan penggunaan listrik terjual ( Kwh) akan berpotensi meningkatkan investasi daerah sebesar 0.052 persen, ceteris paribus, dan setiap 1 persen kenaikan jaringan telepon akan berpotensi terhadap kenaikan investasi daerah sebesar 0.126 persen, ceteris paribus, sedangkan air bersih positif dan tidak signifikan yaitu pada  $\alpha = 25$  dimana, setiap kenaikan 1 persen penggunaan air bersih hanya berpotensi terhadap kenaikan investasi sebesar 0.014 persen, ceteris paribus.

Prasarana jalan berperan penting dalam merangsang maupun mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi, keterbatasan jaringan jalan dapat menghambat pertumbuhan suatu wilayah sehingga aktivitas perekonomian dapat terganggu yang akhirnya bisa menyebabkan bertambahnya harga-harga suatu barang. Daerah dengan standar kehidupan yang rendah umumnya mempunyai keterbatasan dalam hal akses ke daerah lain, ke fasilitas-fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan maupun administrasi. Jadi ketersediaan prasarana jalan harus mampu memenuhi tuntutan pembangunan seiring dengan membesarnya kota, peningkatan jumlah penduduk serta berkembangnya industri dan perdagangan. Keuntungan peningkatan infrastruktur transportasi berupa peningkatan aksesibilitas, pengurangan waktu tempuh dan biaya pergerakan barang, manusia serta jasa. Peningkatan transportasi tidak hanya mempengaruhi orang atau bisnis yang berhubungan langsung dengan fasilitas transportasi umum juga pada konsumen barang dan jasa baik berupa pengurangan harga serta peningkatan upah bagi para pekerja.

Selain itu, pembangunan prasarana jalan turut berperan dalam merangsang tumbuhnya wilayah-wilayah baru. Tumbuhnya kota-kota baru dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan perumahan dan lingkungan yang

memadai tentunya membutuhkan akses baru guna memberikan pelayanan terhadap wilayah tersebut.

Ketersediaan jaringan listrik merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, hampir seluruh peralatan rumah tangga maupun kantor serta aktivitas-aktivitas masyarakat membutuhkan energi listrik. Kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Peningkatan produksi dan investasi juga membutuhkan prasarana listrik yang memadai baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Keterlambatan pengembangan energi listrik dapat berakibat fatal seperti kehilangan kapasitas produksi industri, penurunan nilai ekspor serta keengganan investor untuk melakukan investasi.

Berdasarkan hasil korelasi jaringan telepon merupakan terbesar kedua setelah panjang jalan, hal ini menunjukkan bahwa telepon mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja investasi setelah jalan, meskipun penggunaan telepon bergerak (mobile phone) yang berkembang pesat akan tetapi datanya tidak termasuk data-data yang tidak dipublikasikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini.

Dampak telekomunikasi mencakup berbagai bidang diantaranya untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan tingkat kompetisi, serta mempercepat laju penyebaran teknologi melalui penyebaran informasi secara cepat. Pasar menjadi lebih efektif karena akses menjadi lebih cepat dan mudah sehingga pasar bisa diperluas. Operasional rumah tangga baik akses terhadap barang maupun jasa juga menjadi lebih efisien dengan semakin terintegrasinya tempat tinggal dengan tempat kerja. Telekomunikasi turut mempermudah prosedur sejalan dengan semakin praktisnya cara hidup manusia. Penggunaan jasa telekomunikasi juga dapat mengganti bentuk komunikasi lainnya (misalnya : surat dan perjalanan), sehingga lebih efektif dan efisien dalam penggunaan waktu, energi serta dampak terhadap lingkungan.

Elastisitas air bersih yang kecil terhadap pertumbuhan investasi diduga dapat disebabkan oleh penggunaan proksi yang kurang dapat merepresentasikan kapasitas produksi air yang sebenarnya. Dalam penelitian ini data air bersih menggunakan data publikasi BPS pusat yang mencatat tentang produksi air bersih yang dihasilkan hanya oleh perusahaan air minum (PDAM) saja, sedangkan produksi air juga dapat diperoleh dari pembuatan sumber air lain, misalnya air tanah (sumur) atau langsung dari sumber alam yaitu sungai dan danau. Perusahaan industri biasanya lebih memilih lokasi yang mendekati sumber air langsung selain untuk lebih menghemat biaya produksi juga untuk lebih memudahkan dalam penanganan limbah dengan mendirikan instalasi pengolahan air limbah yang dekat dengan sungai.

#### **4.4. Analisis Efek Individu Tiap Propinsi**

Karena penelitian ini mengestimasi dengan menggunakan model fixed effect, maka memungkinkan adanya analisis efek individu dari setiap propinsi, yang dapat diartikan sebagai posisi potensi relatif suatu propinsi terhadap propinsi lainnya. Karena efek individu merupakan cerminan dari variabel yang tidak terobservasi, maka untuk menganalisisnya (dalam kerangka fixed effect) adalah dengan mengelaborasi variable yang tidak dimasukkan dalam model tetapi masih memiliki korelasi dengan variable-variabel bebas dalam model. (Wooldridge, 2002)

Efek individu yang dihasilkan oleh model fixed effect merupakan gambaran adanya heterogenitas setiap daerah yang mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Atau dengan kalimat lain daerah tersebut memiliki keunggulan atau posisi potensi relatif suatu propinsi terhadap propinsi lainnya dalam variable lain di luar variable bebas yang digunakan dalam model. Apabila diasumsikan variable-variabel bebas tidak mengalami perubahan, maka masing-masing propinsi akan memiliki daya tarik investasi yang berbeda-beda karena determinan dari kinerja investasi suatu daerah hanya akan tergantung dari efek individunya yaitu dari nilai konstanta (intersep) ditambah dengan fixed effect (heterogenitas antar daerah).

Hal ini mencerminkan bahwa masing-masing propinsi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga kemampuan dalam menciptakan kinerja investasi daerah juga berbeda-beda. Walaupun demikian secara keseluruhan heterogenitas antar propinsi/daerah di Indonesia tidak terlalu berbeda/bervariasi. Berikut ini efek individu masing-masing propinsi yang menunjukkan posisi relatif masing-masing daerah propinsi terhadap propinsi lainnya :

Tabel 4.2  
Efek Individu Tiap Propinsi

PROPINSI	INTERSEP	FIXED EFFECT	EFEK INDIVIDU PROPINSI
Prop. Aceh	11.67341	-0.039805	11.63361
Prop. Sumatra Utara	11.67341	0.417989	12.09140
Prop. Sumatra Barat	11.67341	-0.070619	11.60279
Prop. Riau	11.67341	-0.026211	11.64720
Prop. Jambi	11.67341	-0.350500	11.32291
Prop. Sumatra Selatan	11.67341	0.500526	12.17394
Prop. Bengkulu	11.67341	-0.800721	10.87269
Prop. Lampung	11.67341	0.013618	11.68703
Prop. DKI Jakarta	11.67341	-0.845232	10.82818
Prop. Jawa Barat	11.67341	1.467070	13.14048
Prop. Jawa Tengah	11.67341	1.321063	12.99447
Prop. DI Yogyakarta	11.67341	-0.671080	11.00233
Prop. Jawa Timur	11.67341	1.404289	13.07770
Prop. Bali	11.67341	-0.538284	11.13513
Prop. NTB	11.67341	0.042241	11.71565
Prop. NTT	11.67341	0.122247	11.79566
Prop. Kalimantan Barat	11.67341	0.275074	11.94848
Prop. Kalimantan Tengah	11.67341	-0.290057	11.38335
Prop. Kalimantan Selatan	11.67341	-0.209512	11.46390
Prop. Kalimantan Timur	11.67341	-0.435553	11.23786
Prop. Sulawesi Utara	11.67341	-0.669663	11.00375
Prop. Sulawesi Tengah	11.67341	-0.222652	11.45076
Prop. Sulawesi Selatan	11.67341	0.285103	11.95851
Prop. Sulawesi Tenggara	11.67341	-0.400280	11.27313
Prop. Maluku	11.67341	-0.347615	11.32580
Prop. Papua	11.67341	0.068563	11.74197

Berdasarkan hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur mempunyai efek individu yang paling tinggi, relatif terhadap daerah lain. Hal ini bisa diartikan bahwa terdapat variable lain yang dimiliki oleh Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur di luar variable bebas di dalam model yang mampu mendorong daya tarik investasi daerahnya dibandingkan dengan daerah-daerah lain sebesar 13.14048 dan 13.07770 (ceteris paribus).



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

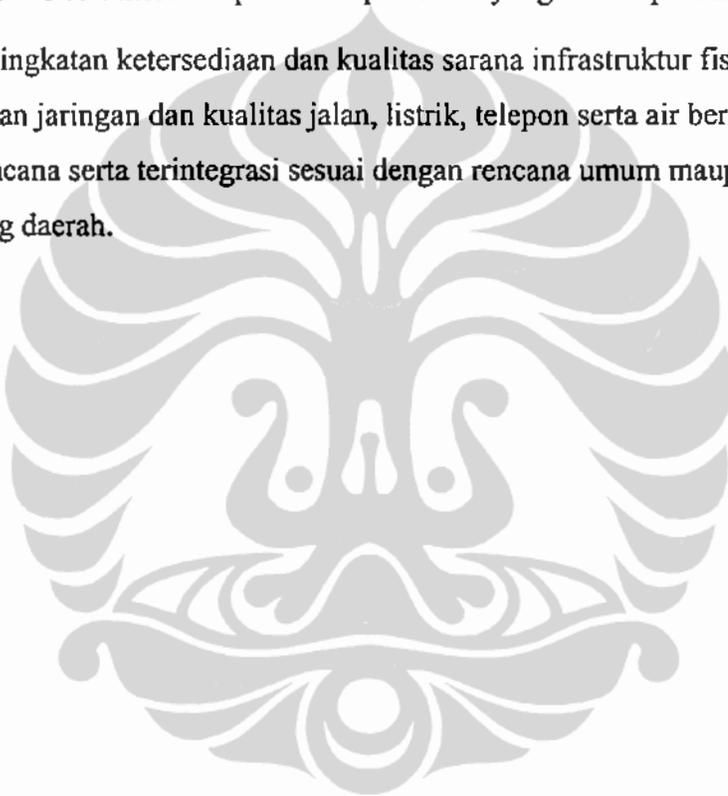
Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan antara tingkat keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur terhadap kinerja investasi daerah selama periode penelitian. Pada bagian awal akan disajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan pada bagian selanjutnya berdasarkan dari kesimpulan yang telah dihasilkan akan disajikan rekomendasi kebijakan/saran yang terkait dengan kinerja investasi daerah.

#### 5.1. Kesimpulan

1. Hubungan antara tingkat keterbukaan perdagangan terhadap kinerja investasi daerah adalah bernilai positif, artinya tingkat keterbukaan perdagangan dapat mendorong peningkatan kinerja investasi daerah.
2. Ketersediaan infrastruktur (panjang jalan, jaringan listrik, telepon dan air bersih) terhadap kinerja investasi daerah bernilai positif dan signifikan. Sehingga panjang jalan, ketersediaan jaringan listrik, telepon dan air bersih menjadi sangat penting bagi kinerja investasi daerah pada masing-masing propinsi di seluruh Indonesia.
3. Tingkat keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap kinerja investasi daerah, namun secara parsial mempunyai pengaruh yang berbeda-beda.
4. Efek individu yang dihasilkan oleh model fixed effect merupakan gambaran dari heterogenitas setiap daerah Propinsi di seluruh Indonesia. Heterogenitas antara daerah yang dihasilkan mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Dengan kata lain, daerah tersebut memiliki keunggulan dalam variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam model. Meskipun demikian dari efek individu yang dapat dilihat dari nilai konstantanya, secara keseluruhan tiap-tiap propinsi tidak terlalu berbeda/bervariasi.

## 5.2. Saran

1. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung terciptanya iklim investasi di daerah adalah dengan membuat peta potensi wilayah yang didukung dengan hasil penelitian dan pengkajian yang mendalam, setelah itu dijabarkan dalam informasi yang deskriptif seperti pembuatan profil-profil proyek investasi dan juga mengkondisikan peraturan daerah yang pro bisnis dan merevisi peraturan-peraturan yang kontra produktif.
2. Perlu adanya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana infrastruktur fisik seperti peningkatan jaringan dan kualitas jalan, listrik, telepon serta air bersih secara lebih terencana serta terintegrasi sesuai dengan rencana umum maupun rencana tata ruang daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Appleyard, Dennis R, Alfred J. Field, Jr, Steven L. Cobb. (2006). *International Economics*, fifth edition, McGraw-Hill International Edition.
- Baltagi, Badi H. (2001). *Econometric Analysis of Panel Data, Second Edition*. England : John Wiley & Sons, Ltd.
- Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Daerah (2007). *Penegembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*, Jakarta.
- Bank, The World. (2007). *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia : Memaksimalkan Peluang Baru*.
- Ekananda, Mahyus. (2008). *Bahan Kuliah Ekonometri: Estimasi menggunakan Data Panel*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Greene, H. (2005). *Econometric Analysis 4th Edition*. USA: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. Fourth Edition. Singapore : McGraw Hill Companies.
- Heriyanto, Tedi. (1999). *Defisit Transaksi Berjalan*. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Gajah Mada.
- Ishida, Masahi. (2003) *Industrialization In Indonesia Since The 1970's*, Institute of Developing Economics (IDE-JETRO).
- Imelda. (2006). *Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi Daerah*. Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEUI. Depok, Universitas Indonesia.
- Jaya Azis, Iwan. (1985). *Pembangunan Daerah dan Aspek Alokasi investasi antar Daerah*. Prisma.
- Khrisna, Kalla, Ataman Ozildirim & Norman R. Swanson. (1998). *Trade, Investment and Growth : Nexus, Analysis and Prognosis*, Pennsylvania State University.
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggi Rahajeng. (2005) *Daya Tarik Investasi dan Pungli Di DIY*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Kuncoro, Mudrajad. (2005). *Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY*: Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Kertonegoro, Sentanu. (1998). *Sistem Penyelenggaraan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Isu Privatisasi Jaminan Sosial*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

- Kumar, Nagesh.(2001). *Infrastructure Availability, Foreign Direct Investment Inflow and Their Export-Oriented : A Cross-Country Explanation*, New Delhi : Research and Information System For Developing Countries.
- KPPOD. (2001-2005, 2007). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/ Kota di Indonesia*, Jakarta..
- KPPOD. (2005). *Pemekaran Daerah : Misi Perimbangan Keuangan dan Kesejahteraan di Daerah*. Jakarta.
- LPEM, FEUI. (2005) *Pemantauan Iklim Investasi di Indonesia*. Laporan dari Survei.
- LPEM FE UI. (2001). *Construction of Regional Index of Doing Business in Indonesia: LPEM FE UI*
- Nachrowi, Nachrowi J. Dan Usman, Hardius. (2005). *Penggunaan Teknik Ekonometri : Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan, Menggunakan Paket Program SPSS ED-1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Puspita, Klarawidya. (2006). *Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Di Indonesia 1993-2002*. Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi. Depok, Universitas Indonesia.
- Pyndick, Robert S and Daniel L. Rubinfeld. (1998). *Econometric Models and Economic Forecast*. New York : McGraw-Hill International.
- Perkembangan Penanaman Modal, *Laporan Bulanan*. (2007, Des). Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
- Ray, D. (2003). *Regulatory Refrom and Local Goverment in Indonesia*. Paper presented at the 5<sup>th</sup> IRSA International Conference 18-19<sup>th</sup> July, 2003 Bandung.
- Salvator, Dominick. (2004). *International Economics*, Eigh Edition, John Wiley & Son.
- Sukirno, Sadono. (2002). *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT Rajawali Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Sumantoro. (1995). *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group.
- Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
- Statistik Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
- Statistik Air Bersih, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.

Sektor Ekonomi Keuangan Propinsi, Bank Indonesia, Jakarta.

Todaro, Michael. (2000). *Pembangunan di Dunia Ketiga*, Rajawali Pers, Yakarta.

Tambunan, Tulus. (2006) *Iklm Investasi di Indonesia, Masalah, Tantangan dan Potensi*. Bisnis & Ekonomi Politik, Vol 7 (2).

Tambunan, Mangara. (2005). *Overview Spatial Mapping on Investment and Local Economic Development in Indonesia 2005*.

Arliani, Tunik Wusri .(2007). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEUI. Depok, Universitas Indonesia.

Williamson dan Qudri, Mont dalam Brahmantio. (2001). *Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Kondusifitas Iklm Usaha Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Laporan penelitian, Center for Economic and Social Studies (CESS), Jakarta.

Yoenanto, Sinung. (2007). *Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Tesis, Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Depok Universitas Indonesia.

Hasil Estimasi dengan Model *Common Effects*

Dependent Variable: LOG(INVEST?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/23/08 Time: 10:30

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KETERBUKAAN?)	0.072833	0.087522	0.832168	0.4066
LOG(JALAN?)	-0.220308	0.054154	-4.068143	0.0001
LOG(LISTRIK?)	0.167248	0.077593	2.155455	0.0327
LOG(TELEPON?)	0.632551	0.093816	6.742488	0.0000
LOG(AIR?)	0.638657	0.095386	6.695506	0.0000
R-squared	0.513201	Mean dependent var	14.62607	
Adjusted R-squared	0.500306	S.D. dependent var	0.925344	
S.E. of regression	0.654117	Akaike info criterion	2.020465	
Sum squared resid	64.60822	Schwarz criterion	2.118217	
Log likelihood	-152.5963	Durbin-Watson stat	0.255448	

Lampiran 2 :  
 Hasil Estimasi dengan Model *Random Effects*

Dependent Variable: LOG(INVEST?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 10/23/08 Time: 10:33  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 156  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.375738	0.930597	9.000393	0.0000
LOG(KETERBUKAAN?)	0.111621	0.060080	1.857873	0.0651
LOG(JALAN?)	0.118962	0.080759	1.473040	0.1428
LOG(LISTRIK?)	0.051328	0.029247	1.754982	0.0813
LOG(TELEPON?)	0.318212	0.091249	3.487293	0.0006
LOG(AIR?)	0.021777	0.049067	0.443824	0.6578
Random Effects (Cross)				
_ACEH-C	0.016508			
_SUMUT-C	-0.028040			
_SUMBAR-C	-0.001891			
_RIAU-C	-0.138579			
_JAMBI-C	-0.187413			
_SUMSEL-C	0.375462			
_BENGKULU-C	-0.537950			
_LAMPUNG-C	0.055495			
_DKI-C	-1.051196			
_JABAR-C	0.891750			
_JATENG-C	0.889276			
_DIY-C	-0.357404			
_JATIM-C	0.913002			
_BALI-C	-0.413216			
_NTB-C	0.301709			
_NTT-C	0.456772			
_KALBAR-C	0.218333			
_KALTENG-C	-0.179924			
_KALSEL-C	-0.173653			
_KALTIM-C	-0.818122			
_SULUT-C	-0.357862			
_SULTENG-C	0.074311			
_SULSEL-C	0.251889			
_SULTGR-C	-0.022916			
_MALUKU-C	-0.183379			
_PAPUA-C	0.007039			

## Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.467269	0.8601
Idiosyncratic random	0.188479	0.1399

## Weighted Statistics

R-squared	0.361716	Mean dependent var	2.376498
Adjusted R-squared	0.340440	S.D. dependent var	0.236888
S.E. of regression	0.192384	Sum squared resid	5.551763
F-statistic	17.00103	Durbin-Watson stat	1.207995
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Unweighted Statistics

R-squared	0.697103	Mean dependent var	14.62607
Sum squared resid	40.20069	Durbin-Watson stat	0.166826

Lampiran 3 :  
 Hasil Estimasi dengan Model *Fixed Effects*

Dependent Variable: LOG(INVEST?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 10/23/08 Time: 10:34  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.57136	1.632180	7.089513	0.0000
LOG(KETERBUKAAN?)	0.083845	0.072583	1.155153	0.2502
LOG(JALAN?)	0.174697	0.186369	0.937370	0.3504
LOG(LISTRİK?)	0.091491	0.037797	2.420570	0.0169
LOG(TELEPON?)	0.049741	0.139314	0.357045	0.7217
LOG(AIR?)	0.016836	0.050188	0.335466	0.7378
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH-C	-0.137914			
_SUMUT-C	0.551450			
_SUMBAR-C	-0.024383			
_RIAU-C	-0.126993			
_JAMBI-C	-0.401470			
_SUMSEL-C	0.459978			
_BENGKULU-C	-0.745338			
_LAMPUNG-C	0.015083			
_DKI-C	-0.576012			
_JABAR-C	1.582260			
_JATENG-C	1.469488			
_DIY-C	-0.503516			
_JATIM-C	1.523908			
_BALI-C	-0.411242			
_NTB-C	0.030527			
_NTT-C	0.110044			
_KALBAR-C	0.177736			
_KALTENG-C	-0.466971			
_KALSEL-C	-0.241911			
_KALTIM-C	-0.639215			
_SULUT-C	-0.590633			
_SULTENG-C	-0.302472			
_SULSEL-C	0.362429			
_SULTGR-C	-0.452421			
_MALUKU-C	-0.434146			
_PAPUA-C	-0.228267			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.966542	Mean dependent var	14.62607
Adjusted R-squared	0.958512	S.D. dependent var	0.925344
S.E. of regression	0.188479	Akaike info criterion	-0.323771
Sum squared resid	4.440522	Schwarz criterion	0.282290
Log likelihood	56.25414	F-statistic	120.3687
Durbin-Watson stat	1.453841	Prob(F-statistic)	0.000000

---



Lampiran 4 :  
Hasil Uji F (Individual Effect atau Common Effect)

**Pengujian Signifikansi**

$H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$  (intersep sama untuk setiap individu/common effects)

$H_1 = \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$  (intersep berbeda untuk setiap individu/individual effects).

Adapun uji signifikansinya dilakukan dengan uji F sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{(R^2_{FEM} - R^2_{POOLED})/(n-1)}{(1 - R^2_{FEM})/(nT-n-k)}$$

**Dimana :**

$R^2_{FEM}$  =  $R^2$  dari model individual effects

$R^2_{POOLED}$  =  $R^2$  dari model common effects

n = jumlah individu (26, yaitu 26 propinsi)

T = jumlah time series (6, yaitu Tahun 2001-2006)

k = jumlah variabel bebas (5)

(n-1) = jumlah variable yang diretriksi (common effects)

(nT-n-k) = derajat bebas

Hasil perhitungan :

$$F_{hitung} = \frac{((0,9665-0,5132)/25)}{((1-0,9665)/(156-30))}$$

$$= 68,198$$

Nilai kritis :  $F_{(0,01;34;168)} = 1,95$

Keputusan : Tolak  $H_0$

Kesimpulan : Pada  $\alpha = 1\%$ , model yang digunakan adalah model individual effects.

## Hasil Uji LM (Struktur var-cov residual homokedastik atau heterokedastik)

Uji Langrange Multiplier (LM test) yang berdistribusi Chi-square ( $\chi^2$  (DF = n-1; prob=95 %)) dengan formula sebagai berikut :

$$LM = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\sigma_i^2}{\sigma^2} - 1 \right]^2$$

Sedangkan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \sigma_i^2 = \sigma^2 \text{ (struktur homokedastik)}$$

$$H_1 = \sigma_i^2 \neq \sigma^2 \text{ (struktur heterokedastik)}$$

Nilai LM =

Wilayah kritis  $\chi^2_{(0.01; )} =$

Keputusan : Tolak  $H_0$

Kesimpulan : Pada  $\alpha = 1\%$ , estimator yang tepat untuk regresi data panel adalah dengan struktur varians kovarian residual bersifat heterokedastik.

Lampiran 6 :  
 Hasil Estimasi *Fixed Effects* dengan *Cross Section Weights*

Dependent Variable: LOG(INVEST?)  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 10/23/08 Time: 10:27  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 156  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.67341	0.437794	26.66416	0.0000
LOG(KETERBUKAAN?)	0.059868	0.021762	2.751012	0.0068
LOG(JALAN?)	0.245255	0.050340	4.871960	0.0000
LOG(LISTRIK?)	0.051644	0.009239	5.589989	0.0000
LOG(TELEPON?)	0.126338	0.035683	3.540594	0.0006
LOG(AIR?)	0.014022	0.012152	1.153890	0.2507
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH-C	-0.039805			
_SUMUT-C	0.417989			
_SUMBAR-C	-0.070619			
_RIAU-C	-0.026211			
_JAMBI-C	-0.350500			
_SUMSEL-C	0.500526			
_BENGKULU-C	-0.800721			
_LAMPUNG-C	0.013618			
_DKI-C	-0.845232			
_JABAR-C	1.467070			
_JATENG-C	1.321063			
_DIY-C	-0.671080			
_JATIM-C	1.404289			
_BALI-C	-0.538284			
_NTB-C	0.042241			
_NTT-C	0.122247			
_KALBAR-C	0.275074			
_KALTENG-C	-0.290057			
_KALSEL-C	-0.209512			
_KALTIM-C	-0.435553			
_SULUT-C	-0.669663			
_SULTENG-C	-0.222652			
_SULSEL-C	0.285103			
_SULTGR-C	-0.400280			
_MALUKU-C	-0.347615			
_PAPUA-C	0.068563			

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

---

---

Weighted Statistics			
R-squared	0.999159	Mean dependent var	62.97153
Adjusted R-squared	0.998957	S.D. dependent var	34.23762
S.E. of regression	0.168295	Sum squared resid	3.540402
F-statistic	4950.301	Durbin-Watson stat	1.464611
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

Unweighted Statistics			
R-squared	0.998930	Mean dependent var	14.62607
Sum squared resid	4.502378	Durbin-Watson stat	1.447163

---

---

Suwanto S.Sos selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kaliwungu yang telah membri ijin serta semangat hingga suksesnya pendidikan ini;

7. Terima kasih buat Mbak Ilwa serta rekan-rekan seperjuangan Kelompok Bappenas PPIE-UI terutama “Pak Penta dan Bang Isnuroso yang dalam menempuh pendidikan hingga penyelesaian tesis ini telah banyak membantu dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Yang terakhir adalah Yai Muhaidi serta berbagai pihak yang telah memberikan saran, bantuan doa serta restu hingga terselesaikannya pendidikan ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selesainya studi ini. Tesis ini bukan tujuan akhir melainkan merupakan salah satu tujuan antara yang harus penulis lalui untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, kebaikan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang berkesempatan membaca tulisan ini sangat diharapkan.

Depok, 23 Desember 2008

Penulis

Lampiran 7

**PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI (IZIN USAHA TETAP) PMDN  
MENURUT LOKASI, 2001-SEPTEMBER 2006**

WILAYAH	JUMLAH PROYEK					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sumatera	20	12	18	20	40	18
Jawa	114	76	81	88	141	74
Bali	8	3	1	5	11	5
Kalimantan	11	10	13	7	11	11
Nusa Tenggara	-	3	-	2	3	3
Sulawesi	5	3	5	3	5	4
Maluku	2	-	1	-	1	1
Papua	-	1	-	4	2	1
<b>KBI</b>	<b>153</b>	<b>101</b>	<b>113</b>	<b>120</b>	<b>203</b>	<b>108</b>
<b>KTI</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>108</b>	<b>119</b>	<b>129</b>	<b>214</b>	<b>117</b>

WILAYAH	NILAI PROYEK (RP, MILYAR)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sumatera	3.029,4	199,1	1.228,3	1.206,7	13.501,7	3.332,7
Jawa	5.070,1	10.878,1	9.917,0	7.886,3	14.796,6	7.325,0
Bali	311,4	31,6	49,1	60,7	46,4	40,7
Kalimantan	902,0	1.330,4	418,8	5.141,8	1.747,6	1.572,9
Nusa Tenggara	-	14,7	-	174,3	19,7	64,2
Sulawesi	571,4	36,0	275,5	164,4	509,0	68,6
Maluku	6,5	-	1,3	-	0,9	0,2
Papua	-	10,1	-	54,5	43,1	21,4
<b>KBI</b>	<b>9.312,9</b>	<b>12.439,2</b>	<b>11.513,2</b>	<b>14.380,9</b>	<b>30.092,3</b>	<b>12.271,3</b>
<b>KTI</b>	<b>577,9</b>	<b>60,8</b>	<b>276,8</b>	<b>983,0</b>	<b>572,7</b>	<b>154,4</b>
<b>Jumlah</b>	<b>9.890,8</b>	<b>12.500,0</b>	<b>11.890,0</b>	<b>15.264,7</b>	<b>30.665,0</b>	<b>12.425,7</b>

Sumber: BKPM, 2006

**PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI (IZIN USAHA TETAP) PMA  
MENURUT LOKASI, 2001-SEPTEMBER 2006**

WILAYAH	JUMLAH PROYEK					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sumatera	57	25	26	37	50	29
Jawa	358	372	503	474	719	585
Bali	25	17	17	25	109	59
Kalimantan	5	10	14	15	13	11
Nusa Tenggara	3	9	3	2	8	8
Sulawesi	4	6	6	3	6	9
Maluku	1	0	0	0	4	0
Papua	1	3	1	0	0	1
<b>KBI</b>	<b>445</b>	<b>424</b>	<b>560</b>	<b>539</b>	<b>891</b>	<b>684</b>
<b>KTI</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Jumlah</b>	<b>454</b>	<b>442</b>	<b>570</b>	<b>544</b>	<b>909</b>	<b>702</b>

WILAYAH	NILAI PROYEK (US\$ JUTA)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sumatera	906,7	90,1	501,7	350,4	1.224,6	526,6
Jawa	2.481,6	2.740,1	4.515,6	5.248,1	7.251,2	3.143,9
Bali	28,5	3,4	23,8	10,7	97,5	98,1
Kalimantan	53,5	188,5	137,2	368,0	181,8	499,5
Nusa Tenggara	5,6	3,4	1,4	2,3	5,1	7,3
Sulawesi	7,1	60,5	266,6	20,4	145,3	15,5
Maluku	1,8	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0
Papua	24,8	4,1	4,1	0,0	0,0	0,6
<b>KBI</b>	<b>3.470,3</b>	<b>3.022,1</b>	<b>5.178,3</b>	<b>4.572,2</b>	<b>8.755,1</b>	<b>4.268,1</b>
<b>KTI</b>	<b>39,3</b>	<b>68,0</b>	<b>272,1</b>	<b>5,0</b>	<b>159,5</b>	<b>23,4</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.509,6</b>	<b>3.090,1</b>	<b>5.450,4</b>	<b>4.607,1</b>	<b>8.914,6</b>	<b>4.291,5</b>

Sumber: BKPM, 2006